



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KELURAHAN KIDULDALEM, KELURAHAN JOGOSARI,
DAN DESA PLERET KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh
Siti Jahro
NIM 140910201051

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KELURAHAN KIDULDALEM, KELURAHAN JOGOSARI,
DAN DESA PLERET KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

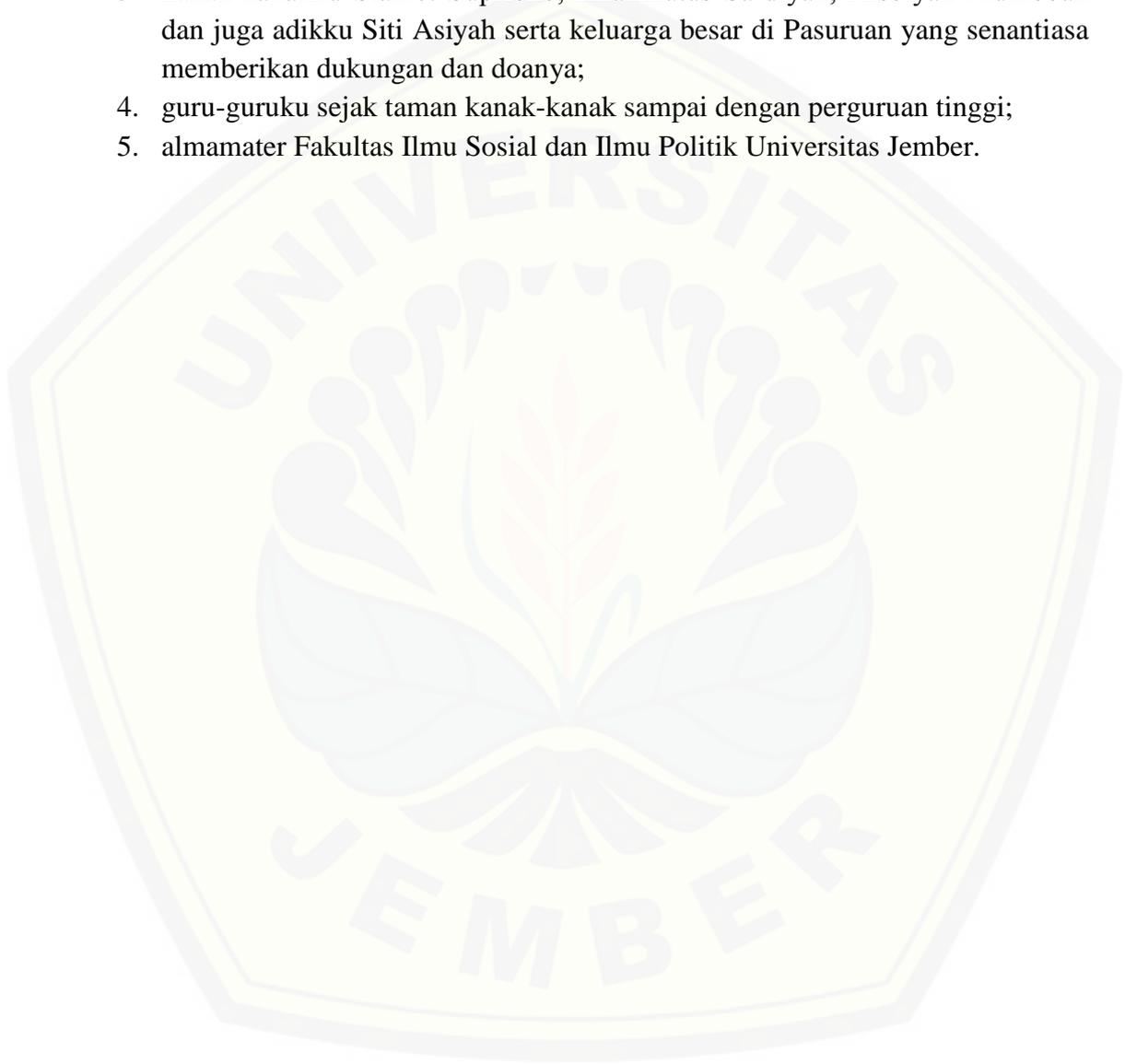
Oleh
Siti Jahro
NIM 140910201051

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. ibunda Sutrami yang tercinta dan senantiasa mendoakan di setiap langkahku;
2. ayahanda Nur Suhud (alm) yang tercinta;
3. kakak-kakakku Slamet Supriono, Khalimatus Sa'diyah, Hisbiyah Muhibbah dan juga adikku Siti Asiyah serta keluarga besar di Pasuruan yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya;
4. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
5. almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(terjemahan surat Al-Insyirah ayat 6)¹

Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa timbul pada samudera, pada gunung berapi dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya. (Pramoedya Ananta Toer dalam Novel Rumah Kaca)²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Juz: 1-30. Kudus: Menara Kudus

² @jejaklangkahpram. Jejak Pramoedya Ananta Toer. https://www.instagram.com/p/BmpDp30F-GD/?utm_source=ig_web_copy_link. [Diakses pada 20 Agustus 2018]

PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Siti Jahro

NIM : 140910201051

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Siti Jahro
NIM 140910201051

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KELURAHAN KIDULDALEM, KELURAHAN JOGOSARI,
DAN DESA PLERET KABUPATEN PASURUAN**

Oleh

Siti Jahro

NIM 140910201051

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agus Suharsono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan” karya Siti Jahro telah disetujui dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 13 September 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D
NIP 196102131988021001

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si
NIP 197003221995122001

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. Agus Suharsono, M.Si ()
NIP 196308141989031023
2. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP ()
NIP 197410072000121001
3. Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., Ph.D ()
NIP 198103222005011001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

***Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, dan Desa Pleret, Kabupaten Pasuruan**; Siti Jahro; 140910201051; 2018; 152 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Munculnya bank sampah di Kabupaten Pasuruan dikarenakan adanya permasalahan ketidakefektifan pengelolaan sampah yang menimbulkan jumlah timbunan sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sangat tinggi dan menyebabkan TPA Kenep mengalami *overload*. Sumber sampah terbesar adalah rumah tangga. Berawal dari permasalahan itu maka muncul ide pengelolaan sampah dari sumbernya yaitu melalui kegiatan bank sampah. Fokus penelitian ini adalah pada pengelolaan sampah melalui bank sampah. Untuk itu dilakukan upaya *collaborative governance* oleh para pemangku kepentingan antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Desa atau Kelurahan, tim penggerak PKK, masyarakat, Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pasuruan khususnya di Kelurahan Kiduldalem, Desa Pleret, dan Kelurahan Jogosari.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi secara langsung, dan analisis dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah telah terlaksana mulai dari tahapan penilaian, inisiasi, deliberasi hingga implementasi. Kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan masih bersifat semiformal yakni hanya berdasarkan pada komitmen para pemangku kepentingan yang terlibat.

Para pemangku kepentingan memiliki peran masing-masing. Kelompok Tim Penggerak PKK di RW 06 Kelurahan Kiduldalem dan RW 05 Desa Pleret dan pemuda di RT 03 RW 06 Gang Rajawali Kelurahan Jogosari berperan sebagai pengelola yang menjalankan operasional bank sampah. Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagai pelindung dan fasilitator dalam pengelolaan bank sampah. Tokoh masyarakat sebagai pendukung dalam kegiatan bank sampah dan ikut mengajak masyarakat agar terlibat dalam kegiatan bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan bank sampah. Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pengurus bank sampah Rajawali Peduli Lingkungan secara teknis. Pengepul berperan sebagai tempat menyetorkan sampah yang dihasilkan dari nasabah untuk dijual.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Agus Suharsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Dra. Inti Wasiati, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
9. Ibunda Sutrami dan kedua kakak saya Slamet Supriyono dan Khalimati Sakdiyah, serta adik tercinta Siti Asiyah yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
10. Bapak Suprpto selaku kepala bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan Non B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan bapak Sari

Haryadi selaku staf pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;

11. Kepala Kelurahan Kiduldalem, Kepala Kelurahan Jogosari, Kepala Desa Pleret, Kepala Desa Ranuklindungan serta seluruh staf yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi kelancaran peneliti dalam memperoleh data saat penelitian;
12. Pengurus Bank Sampah BISS, Bank Sampah Kampung Limo, Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan, Bank Sampah Suketteki yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi kelancaran peneliti dalam memperoleh data saat penelitian;
13. Widya Rainnisa Karlina, M. Syarif Hidayatullah, Nia Mega Kurniasari, Dessy Novitasari, Rizma MA, dan Anikdatul Milla yang telah memberikan banyak nasehat, semangat, bantuan serta dukungannya selama penyusunan skripsi ini;
14. Teman-teman Dhana Febrian Safitri, Karomatul Afida, dan Laily Mutmainah yang telah menjadi rekan berdiskusi selama penelitian dan penulisan skripsi ini;
15. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2014. Terimakasih telah memberikan pembelajaran selama ini;
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Jember, 28 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Administrasi Publik	17
2.2 <i>Good Governance</i>	20
2.2.1 Pemerintah	23
2.2.2 Masyarakat	23
2.2.3 Swasta	24
2.3 <i>Collaborative Governance</i>	26
2.3.1 Definisi <i>Collaborative Governance</i>	26
2.3.2 Proses <i>Collaborative Governance</i>	28
2.4 Pengelolaan Bank Sampah	30

2.4.1 Definisi Pengelolaan	30
2.4.2 Pengertian Bank Sampah	31
2.4.3 Pelaksana Bank Sampah	31
2.4.4 Pengelolaan Sampah Berbasis 3R.....	32
2.5 Penelitian Terdahulu.....	34
2.6 Kerangka Berfikir	36
BAB 3. METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
3.3 Desain Penelitian	39
3.3.1 Fokus Penelitian	39
3.3.2 Penentuan Informan Penelitian	39
3.3.3 Data dan Sumber Data	41
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data	44
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data.....	46
3.5.1 Observasi	46
3.5.2 Wawancara Mendalam (<i>Indepth Interviews</i>).....	47
3.5.4 Analisis Dokumen (<i>Record Reviews</i>)	59
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	53
4.1.1 Profil Kabupaten Pasuruan	53
4.1.2 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.....	57
4.1.3 Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Kabupaten Pasuruan	58
4.1.4 Profil Kelurahan Kiduldalem.....	60
4.1.5 Profil Kelurahan Jogosari	62
4.1.6 Profil Desa Pleret.....	64
4.1.7 Profil Bank Sampah.....	65
4.2 Penyajian Data Penelitian	66
4.2.1 Tahap Penilaian (<i>Assessment</i>)	66
4.2.2 Tahap Inisiasi (<i>Initiation</i>)	76
4.2.3 Tahap Deliberasi/Musyawaharah (<i>Deliberation</i>).....	92
4.2.4 Tahap Implementasi (<i>Implementation</i>).....	103
4.3 Analisis Hasil Penelitian.....	134
4.3.1 Analisis Tahap Penilaian (<i>Assessment</i>)	134
4.3.2 Analisis Tahap Inisiasi (<i>Initiation</i>)	136
4.2.3 Analisis Tahap Deliberatif (<i>Deliberation</i>).....	138
4.2.4 Analisis Tahap Implementasi (<i>Implementation</i>).....	138
BAB 5. PENUTUP	141
5.1 Kesimpulan.....	141
5.2 Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	148

DAFTAR TABEL

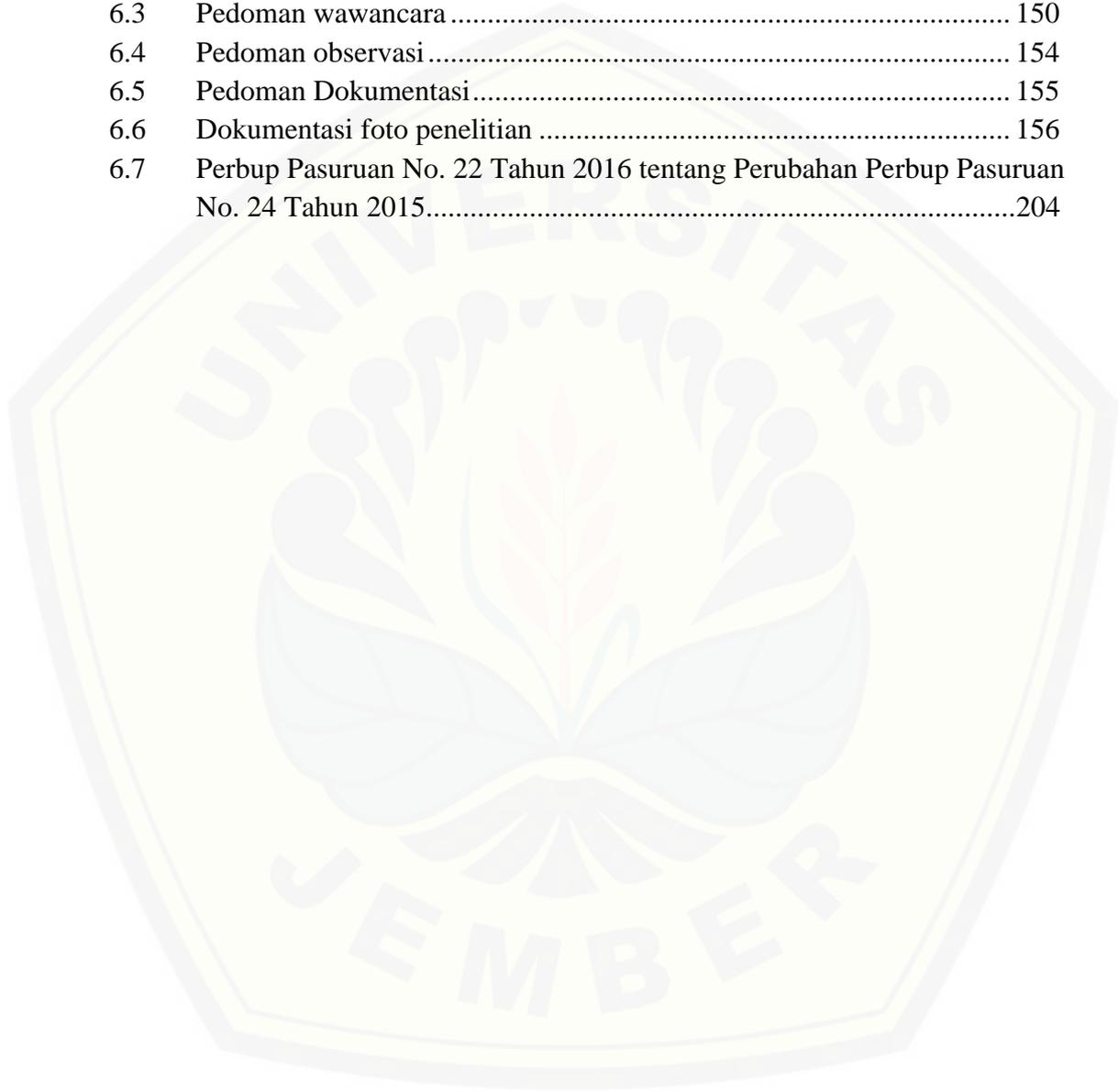
	Halaman
1.1 Jumlah Timbulan Sampah di TPA Kenep.....	2
1.2 Karakteristik Timbulan Sampah di TPA Kenep	2
1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2012-2016	3
2.1 Tahapan-tahapan <i>Collaborative Governance</i>	28
2.2 Penelitian Terdahulu	34
3.1 Data Informan Penelitian	40
3.2 Hasil Data Primer Penelitian	41
3.3 Hasil Data Sekunder Penelitian.....	44
3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	45
3.5 Daftar Informan Penelitian yang Telah Diuji.....	45
4.1 Kondisi Sarana Prasarana Dasar Desa Pleret	65
4.2 Kondisi Perkembangan Usaha Perekonomian Desa Pleret	65
4.3 Tim Pembangunan Gedung Bank Sampah Kampung Limo	89
4.4 Data Sumber Dana Pembangunan Bank Sampah Kampung Limo .	89
4.5 Data Keuangan Acara Peresmian Bank Sampah Kampung Limo ..	91
4.6 Pembagian Tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Bank Sampah BISS	96
4.7 Pembagian Tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan	100
4.8 Pembagian Tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Bank Sampah Kampung Limo	104
4.9 Struktur tata kelola bank sampah BISS.....	107
4.10 Struktur tata kelola bank sampah Rajawali Peduli Lingkungan	117
4.11 Struktur tata kelola bank sampah Kampung Limo.....	125

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Hubungan Tiga Domain dalam <i>Governance</i>	26
2.2 Alur Pikir Penelitian.....	36
3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman	50
4.1 Peta Kabupaten Pasuruan	53
4.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	58
4.3 Struktur Organisasi FKPL Kabupaten Pasuruan	60
4.4 Kerajinan dari botol AQUA	83
4.5 Bantuan bak sampah dari PT. MSD	84
4.6 Peresmian Gedung Bank Sampah Kampung Limo	88
4.7 Bantuan sarana dari DLH Kabupaten Pasuruan	89
4.8 Musyawarah pengurus bank sampah kampung limo	101
4.9 Lokasi Bank Sampah BISS	107
4.10 Penjualan sampah ke pengepul	108
4.11 Pelatihan Daur Ulang	111
4.12 Study Banding Oleh Bank Sampah Kampung Limo	127
4.13 Kegiatan senam pagi sebelum penimbangan bank sampah.....	128
4.14 Pelatihan Daur Ulang Bank Sampah Kampung Limo	131
4.15 Pelatihan Kompos	132
4.16 Pelatihan Pembuatan MOL	132

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
6.1 Surat izin penelitian dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Jember.....	148
6.2 Surat rekomendasi dari Bakesbangpol	149
6.3 Pedoman wawancara	150
6.4 Pedoman observasi	154
6.5 Pedoman Dokumentasi.....	155
6.6 Dokumentasi foto penelitian	156
6.7 Perbup Pasuruan No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbup Pasuruan No. 24 Tahun 2015.....	204



DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI

Daftar Singkatan

TPA : Tempat pembuangan akhir

DLH : Dinas lingkungan hidup

LPM : Lembaga pemberdayaan masyarakat

Perbup : Peraturan bupati

UNDP : *United nation development program*

SK : Surat keputusan

M³ : Meter kubik

Daftar Arti Notasi

% : Persen

³ : kubik

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan. Sampah merupakan sisa barang yang berasal dari aktivitas manusia atau rumah tangga yang tidak terpakai dan dianggap tidak memiliki kegunaan sehingga patut untuk dibuang. Berdasarkan asalnya sampah dapat dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat berasal dan dapat terurai melalui proses alam, namun sampah anorganik tidak dapat terurai dengan melalui proses alam melainkan dapat diatasi dengan pengelolaan yang tepat dan bijak yaitu melalui proses 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). (Basriyanta, 2007:17-20)

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.474,02 km² dengan jumlah kecamatan sebanyak 24 kecamatan yang terdiri dari 265 desa atau kelurahan. Permasalahan sampah di Kabupaten Pasuruan disebabkan karena TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ada saat ini telah mengalami *overload* atau melebihi kapasitas. Timbulan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kenep yang memiliki luas sekitar 2250 m² tersebut mencapai 4707,6 m³ atau setara dengan 940 ton sampah yang dihasilkan per hari. Padahal kapasitas sampah yang bisa masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kenep hanya sekitar 1.200 m³ atau setara dengan 240 ton sampah (Sumber: <http://surabaya.tribunnews.com/2018/04/07/desa-di-kabupaten-pasuruan-diimbau-ikut-kelola-sampah-ini-tujuannya/> diakses pada 30 September 2018 pukul 02.12 WIB)

Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan diketahui bahwa adanya jumlah timbulan sampah yang mengalami *overload* tersebut disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pasuruan hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang beroperasi yaitu terdapat di Desa Kenep, Kecamatan Beji. Selain kondisi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Kenep sudah tidak seimbang

dengan sampah yang masuk karena luasannya yang kecil dan tidak efektif untuk menampung sampah, TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kenep hanya mampu menampung sampah sekitar 11 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Adapun 11 Kecamatan yang dimaksud yaitu Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Bangil, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Lekok, Kecamatan Beji, Kecamatan Gondang Wetan, dan Kecamatan Kejayan.

Jumlah timbulan sampah yang ada di TPA Kenep dari tahun ke tahun semakin mengalami kenaikan. Berikut disajikan data timbulan sampah dari tahun 2013-2017 yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah timbulan sampah di TPA Kenep tahun 2013-2017

No	Tahun	Volume sampah (m ³)
1	2013	23844
2	2014	68893
3	2015	90152
4	2016	90892
5	2017	76666

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2017 (data diolah)

Sumber utama sampah-sampah yang menjadi timbulan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kenep selama ini berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, pusat perdagangan, fasilitas publik, dan industri atau perusahaan. Data terkait sumber timbulan sampah dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Karakteristik timbulan sampah di TPA Kenep tahun 2014

Item	Prosentase (%)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
Rumah Tangga	27%	1271,1
Pasar tradisional	25%	1176,9
Pusat perniagaan	15%	706,1
Fasilitas publik	12%	564,9
Kantor/perusahaan/industri	21%	988,6
Total	100%	4707,6

Sumber: Non Fisik Adipura 2014 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2018 (data diolah)

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber timbulan sampah terbesar berasal dari rumah tangga yaitu sebesar 27% dengan rata-rata 1271,1 m³ per hari. Besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk tersebut terhadap barang atau material. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan (Purwendro dan Nurhidayat, 2007:5). Hal ini juga terjadi di Kabupaten Pasuruan dimana besarnya volume sampah diimbangi dengan meningkatnya jumlah penduduk. Berikut disajikan data jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2012-2016 berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan tahun 2017.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1	2012	1.531.025
2	2013	1.556.700
3	2014	1.569.507
4	2015	1.581.787
5	2016	1.593.683

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2017, data diolah

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kenep yang mengalami *overload* dan jumlah timbulan sampahnya yang terus meningkat pada akhirnya membawa dampak negatif. Masyarakat sekitar yang berada dekat dengan lokasi pembuangan sampah tersebut resah karena selain menimbulkan bau busuk yang menyengat, juga menyebabkan berkembang-biaknya lalat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat terlebih pada musim penghujan. (Sumber <http://www.laraspostonline.com/2014/12/pembuangan-sampah-di-kenep-beji-ganggu.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 13.07 WIB)

Dampak negatif akibat sampah yang berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat luas di atas pada akhirnya menjadikan sampah sebagai masalah publik dimana membutuhkan solusi pemecahan masalah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan beberapa cara seperti penyediaan lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) baru yaitu di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo. Proses pembebasan lahan untuk rencana TPA

(Tempat Pembuangan Akhir) baru sudah diselesaikan pada tahun 2017. Namun TPA baru tersebut masih belum bisa difungsikan. Hal ini dikarenakan pembangunan secara fisik belum dilakukan karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan masih proses mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat sebab membutuhkan anggaran untuk pembangunan yang besar yaitu sekitar Rp 40 miliar, anggaran ini dibutuhkan untuk pembangunan fisik sekaligus pemenuhan sarana prasarana pendukung lainnya. Salah satu penyebab besarnya anggaran pembangunan karena lahan yang akan dibangun cukup luas yaitu 4,9 hektare. (Sumber: <https://radarbromo.co.id/2018/08/04/belum-pasti-kan-tpa-wonokerto-dibangun/> diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 23.53 WIB)

Permasalahan TPA yang mengalami *overload* selain karena adanya TPA baru sebagai pengganti yang belum berfungsi, juga dikarenakan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan belum terintegrasi dengan baik dari satu tahap ke tahap lainnya seperti tempat sampah dan pemilahan sampah yang belum sesuai dengan pengelompokan sampah sehingga menyebabkan ketidakefektifan dan penumpukan sampah di TPS, kemudian pengumpulan dan pengangkutan sampah yang mencampur dari berbagai jenis sampah sehingga menyebabkan pengelolaan sampah menjadi belum efektif. Ketidakefektifan ini dapat dilihat dari sampah yang sudah diupayakan untuk dilakukan pemilahan oleh beberapa masyarakat kembali disatukan saat pengumpulan dan pengangkutan.

Kemudian kegiatan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat belum optimal, hal ini dikarenakan penyediaan sarana TPS 3R (Tempat Pembuangan Sementara model *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) masih dalam proses dan belum berjalan secara maksimal. Hal ini diketahui berdasarkan pernyataan dari bapak Sari Haryadi selaku staf pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang menyatakan, “untuk pengurangan sampah kita ada bangunan fisik TPS 3R tetapi belum maksimal, nantinya akan disinergikan dengan bank sampah itu” (wawancara dengan pak Sari pada tanggal 26/03/2018 pukul 10.00 WIB). Belum disinergikannya antara TPS 3R dengan kegiatan pengelolaan sampah lainnya seperti kegiatan bank sampah yang ada di Kabupaten

Pasuruan belum mampu untuk mengurangi beban sampah yang diangkut ke TPA Kenep.

Pada tahun 2014, Bupati Pasuruan bapak Irsyad Yusuf mencanangkan sebuah program SDSB yaitu Satu Desa Satu Bank Sampah. Program SDSB ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan akan kondisi TPA Kenep. Selain itu, bank sampah juga dapat menjadi salah satu sumber penghasilan ekonomi di masyarakat. Seperti yang disampaikan bapak Irsyad Yusuf, “Secara ekonomis, bank sampah akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pemilahan limbah sampah juga bisa digunakan untuk bahan baku kerajinan ataupun dijual sesuai kategori limbah sampah.” (Sumber: <https://news.okezone.com/read/2016/04/15/519/1364097/bupati-pasuruan-galakkan-program-sdsb&hl=id-ID> diakses pada 30 September 2018 pukul 15.52 WIB)

Program SDSD (Satu Desa Satu Bank Sampah) tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan menghimbau untuk membentuk Bank Sampah pada masing-masing desa dan kelurahan. Himbauan tersebut disampaikan kepada para Camat melalui surat edaran pada tanggal 21 Mei 2015 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan nomor 660/816/424.078/2015 perihal pembentukan Bank Sampah di setiap desa minimal 1 (satu) Bank Sampah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, bapak Sari Haryadi selaku staf pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa data bank sampah yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup belum menyeluruh karena masih terdapat desa yang sudah membentuk bank sampah tetapi belum melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2018 ini jumlah bank sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 41 unit bank sampah yang tersebar di 27 desa dan kelurahan yakni Kiduldalem (10), Kauman (3), Latek (1), Gempeng (1), Dermo (1), Sumbersuko (3), Wonosari (1), Pagak (1), Wonokoyo (1), Karangjati (1), Pandaan (1), Jogosari (1), Pecalukan (1), Candiwates (1), Ketegan (1), Toyaning (1), Sambirejo (1), Kawisrejo (1),

Winongan Lor (1), Bandaran (1), Pleret (1), Warungdowo (1), Kersikan (1), Kalirejo (1), Tejowangi (1), Glagahsari (1), Ranuklindungan (1). Bank sampah yang sudah dilegalkan atau memiliki Surat Keputusan (SK) Kepala Desa sebanyak 34 bank sampah, sedangkan 7 bank sampah sudah terbentuk namun belum memiliki SK atau dilegalkan. Dengan adanya SK tersebut menandakan bahwa bank sampah tersebut telah berkegiatan dan lengkap secara administrasi. (Sumber: Data Bank Sampah Kabupaten Pasuruan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah bank sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan masih terbilang cukup sedikit mengingat bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki 24 Kecamatan yang terbagi menjadi 341 desa dan 24 kelurahan. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di beberapa bank sampah ditemukan bank sampah yang tidak beroperasi atau tidak aktif seperti Bank Sampah Wanjati, Bank Sampah Tejowangi, Bank Sampah Lingkar Pandaan. Namun pada tahun 2018 ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki target membentuk bank sampah di 144 desa dengan didampingi oleh 12 tenaga harian lepas sebagai fasilitator selama satu tahun yang akan membantu untuk membentuk, mendampingi, dan mengaktifkan kembali bank sampah yang pasif. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Sari Haryadi selaku staf pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan Saudara Fatoni selaku Ketua Forum Komunikasi Peduli Lingkungan sekaligus tenaga fasilitator pendamping. Dari sekian jumlah Bank Sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan, penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada Bank Sampah yang berada di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil, Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan, dan Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek.

Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil dipilih karena adanya permasalahan terkait lingkungan yang dialami oleh Kecamatan Bangil khususnya Kelurahan Kiduldalem. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Kiduldalem sebagai berikut.

“Saya sebetulnya itu bukan tujuan akhir ya Bank sampah itu, tapi bagaimana saya begitu memasuki kelurahan Kidul Dalem pada tahun 2011 sambil mempelajari karakteristik masyarakat disana itu

kayak apa, dinamikanya kayak apa kan gitu kan ya, trus potensinya kayak apa sehingga saya mulai berfikir bagaimana. Karena posisi Kidul Dalem itu walaupun di tengah kota pada saat itu ada predikat yang *nggak* nyaman. Mungkin sebelum-sebelumnya seperti itu, *nggak* nyaman karena dari Dinas Kesehatan itu punya stempel namanya daerah kumuh.” (Wawancara dengan pak Bambang EP pada tanggal 7/03/2018 pukul 08.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil sebelumnya mendapatkan predikat kumuh dari Dinas Kesehatan. Selain itu, Kelurahan Kiduldalem merupakan wilayah yang strategis dimana Kelurahan Kiduldalem menjadi pusat transaksi, pusat perdagangan. Terbukti dengan adanya pasar, dua plasa yaitu plasa barat dan plasa timur. Kemudian di Kelurahan Kiduldalem banyak ditemukan pengusaha-pengusaha kecil dan berbagai macam UKM (Usaha Kecil Mikro) seperti pengusaha kue, pengrajin bordir, dan pengrajin perak. Sehingga adanya potensi ekonomi yang cukup tinggi ini menimbulkan dampak yaitu produksi sampah yang tinggi dan belum terkelola dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan Bapak Bambang EP selaku Kepala Kelurahan Kiduldalem periode 2011-2017 berinisiatif untuk melakukan penanganan salah satunya dengan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Bambang EP selaku Kepala Kelurahan Kiduldalem periode 2011-2017 yang menyatakan,

“Tahun 2012 saya sudah mulai membuat konsep bagaimana sih cara mengatasi predikat kumuh ini *ilang*. Memang *gak* iso *sekonyong-konyong*. *Nggak* bisa. Apa yang saya lakukan dulu? Karena apa? Kelurahan *iku ndak* punya anggaran yang *gedhe*. Serba *njaluk*, kan gitu yaa. Beda dengan *deso*, serba *njaluk*. Terus yang bisa adalah bagaimana mengajak peran serta masyarakat, itu awalnya seperti itu. Kumuh tanda kutip, akhirnya kumuh itu saya pilah dulu kumuhnya yang bagaimana, ukurannya atau bagaimana. Nah saya mulai pendekatan ibu-ibu melalui PKK. Saya bekerja sama dengan bu lurah, nyonya saya sebagai ketua tim penggerak PKK” (wawancara dengan pak Bambang pada tanggal 7/03/2018 pukul 08.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bank sampah menjadi salah satu konsep dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan kelompok masyarakat Kelurahan Kiduldalem yaitu Tim Penggerak PKK. Selain

itu, pemilihan Kelurahan Kiduldalem dalam penelitian ini karena bank sampah di Kelurahan Kiduldalem selalu dipilih menjadi tujuan dalam penilaian adipura di Kabupaten Pasuruan karena Kelurahan Kiduldalem merupakan kelurahan yang pertama kali mendirikan bank sampah di Kabupaten Pasuruan dan Kelurahan Kiduldalem memiliki jumlah bank sampah terbanyak di Kabupaten Pasuruan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bank sampah, meskipun yang aktif saat ini hanya 7 (tujuh) bank sampah. Bapak Bambang EP selaku Kepala Kelurahan Kiduldalem 2011-2017 yang mengatakan,

“Pada tahun 2014 ada pemerintah Bupati namanya SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah) itu tahun 2014 tapi *nggak dijalan-jalan*, ya kan? Eee implementasine *nggak ono*. Sehingga setiap kali ada adipura *jujugane* mana? Kidul Dalem. Padahal namanya Tim dari Pusat itu kan mintanya 5 bank sampah. ...*Buktine nyabet* adipura. Itu kan gini kalau parameternya itu kan salah satu peran masyarakat. Kalau *laine* kan parametere lebih berat kan, *nilaine* lebih berat, terutama TPA, ya kan? Itu lebih nilainya. Kalau bank sampah sih *enggak*. Yang penting parametere apa, grafiknya terus naik-naik teruuus ya artinya volume serapannya sampah kan kita harus itung, jadi harus ada grafik, itu yang kita hitung. (wawancara dengan bapak Bambang pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 08.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bank sampah di Kiduldalem mampu menyumbangkan nilai tambah dalam penilaian adipura. Dan terbukti dengan beberapa prestasi di bidang lingkungan yang didapatkan Kota Bangil seperti Piala Adipura pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 menerima plakat, dan pada tahun 2016 Kota Bangil kembali meraih Piala Adipura dan mampu mempertahankan pada tahun 2017. (Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3577566/kabupaten-pasuruan-pertahankan-piala-adipura-untuk-kota-bangil> diakses 30/09/2018 pukul 23.12 WIB)

Kemudian untuk pemilihan Kelurahan Jogosari khususnya Lingkungan Rajawali karena merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Pasuruan wilayah barat yang jauh dari ibu kota Kabupaten Pasuruan yang juga memiliki masalah terkait kebersihan lingkungan yakni Lingkungan yang terkenal kumuh serta sering terjadinya keterlambatan pengambilan sampah oleh petugas kebersihan. Seperti

yang diungkapkan oleh bapak Agus Wijaya selaku wakil RT.3 RW.6 Kelurahan Jogosari,

“terkenal kampung kumuh dulu itu sini mbak, iyaa terkenal kampung kumuh tahun 2000 an lah sampai sebelum ada pergerakan ini. Terus masalah itu, sampah *kan mesti* diambil orang kan, itu mesti masalah aja itu, saya sebagai wakil RT dulu keliling nyari orangnya itu, kadang satu minggu gak diambil ya, kan disini rata-rata pedagang jadi sampah itu mesti jadi masalah disini, sedangkan buang ke kali kan nggak boleh.” (wawancara dengan bapak Agus Wijaya pada 12 Maret 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa lingkungan Rajawali Kelurahan Jogosari memiliki mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, sehingga sampah yang dihasilkan juga semakin banyak dan apabila terjadi keterlambatan dalam pengambilan akan menimbulkan masalah menumpuknya sampah. Adanya permasalahan tersebut kemudian muncul ide dari pemuda RT 03 RW 06 Gang Rajawali Kelurahan Jogosari untuk mendirikan bank sampah. Gerakan peduli lingkungan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016, namun berdirinya Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan secara resmi pada tanggal 7 Februari 2017.

Semenjak berdirinya bank sampah ini mampu menghasilkan perubahan di RT 03 RW 06 Gang Rajawali Kelurahan Jogosari, terbukti dengan adanya Mural di sepanjang jalan, kerajinan dari sampah yang dipasang di area tepi sungai, dan sungai yang bebas sampah. Meskipun tergolong baru dan masih skala RT, Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan memiliki armada sendiri yang dibeli melalui swadaya dari masyarakat. Armada tersebut digunakan untuk mengangkut sampah warga menuju TPA yang tidak jauh dari Kelurahan Jogosari dan juga untuk menjual sampah yang ada di gudang bank sampah untuk dijual ke pengepul sampah.

Selain itu, Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan juga telah melakukan beberapa kegiatan seperti gerebek sampah yang dilakukan di sungai bersama beberapa pihak diantaranya Pemerintah Kelurahan Jogosari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, Forum Komunikasi Peduli Lingkungan

(FKPL) Kabupaten Pasuruan, dan juga komunitas lingkungan. Selain itu pengurus dari Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan juga aktif mengajukan proposal bantuan ke beberapa perusahaan dan terbukti dengan adanya bak sampah yang diletakkan di sepanjang jalan.

Sedangkan pemilihan Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek adalah dikarenakan Desa Pleret merupakan desa yang mendapatkan penghargaan sebagai Desa Favorit Pilihan Bupati pada acara Bangkit Desaku yang diselenggarakan pada tahun 2017. Penghargaan ini diberikan karena Desa Pleret memiliki program yang serupa dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yaitu mengembangkan Satu Desa Satu Bank Sampah (SDSB). Selain itu Bupati Pasuruan juga menyampaikan bahwa Desa Pleret adalah desa yang memulai program Satu Desa Satu Bank Sampah (SDSB) dengan harapan Desa Pleret menjadi percontohan bagi desa lainnya di Kabupaten Pasuruan. (Sumber: <http://www.radarmalang.id/ini-dia-17-desa-di-pasuruan-yang-meraih-penghargaan-bangkit-desaku-sinergi-jawa-pos/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 22.28 WIB)

Bank sampah yang ada di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek ini adalah Bank Sampah Kampung Limo. Bank sampah Kampung Limo berdiri sejak tahun 2014 yang berasal dari inisiatif tokoh wanita yaitu ibu Peny Sulistyono selaku ketua Tim Penggerak PKK RW.05. Ibu Peny Sulistyono merupakan istri dari bapak Soleh yang merupakan ketua RW.05 dan mulai tahun 2017 beliau menjadi ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) Pleret. Terbentuknya bank sampah ini karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan serta tumpukan sampah yang menggunung di tepi sungai pada kisaran tahun 2013-2014. Kemudian melakukan study banding ke Surabaya karena terinspirasi dengan kampung Jambangan bersama tokoh masyarakat dan kader PKK. Saat ini jumlah anggota bank sampah ini mencapai 90 nasabah yang terdiri dari usia 16-75 tahun. Selain dijual, sampah yang dikelola juga dijadikan aneka kerajinan seperti tas, vas bunga, dan kerajinan lainnya. (Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3225252/gedung-bank-sampah-di-kabupaten-pasuruan-dibangun-dari-dana-desa> diakses pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 22.15 WIB)

Sampah Kampung Limo berbeda dari segi fasilitas dan sarana prasarana yang lebih bagus daripada bank sampah yang lain. Bank sampah ini memiliki bangunan dengan luas 48 m² atau 8meter x 6 meter yang dilengkapi fasilitas di dalamnya yang terdiri dari dua kipas angin dan televisi LCD yang terpasang di dinding tembok, komputer dengan meja kerja, serta etalase tempat memajang hasil karya warga dalam mengolah daur ulang sampah. Gedung bank sampah kampung limo merupakan hasil dari swadaya masyarakat untuk pembebasan lahan dan bangunannya dibantu oleh desa melalui Alokasi Dana Desa tahun 2016 sebesar 66 juta rupiah. (Sumber: <https://tribunus-antara.com/2017/02/16/yuk-mengenal-lebih-dekat-bank-sampa.html> diakses pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 22.52 WIB)

Dari beberapa fenomena yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa Pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Pasuruan tidak dapat berjalan sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara atau perbuatan mengelola. Istilah pengelolaan sama dengan manajemen (Endarmoko, 2006 dalam Kodoatie & Roestam, 2010:347). Manajemen (pengelolaan) melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Robbins dan Mary, 2010:7). Selain itu manajemen juga sebagai koordinasi dari semua sumber baik tenaga manusia, dana, material, waktu, metode kerja, dan tempat dengan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. (Henry L. Sisk dalam Nawawi, 2013:11).

Mengenai pengelolaan sampah di Indonesia, kegiatan pengelolaan sampah sudah tercantum sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kabupaten Pasuruan dalam hal pengelolaan sampah juga sudah diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 yang kemudian dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2016 yang menjadi perubahan dalam Peraturan Bupati sebelumnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Selain itu juga dijelaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini berarti diperlukan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan, salah satunya dalam pengelolaan bank sampah.

Kegiatan pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta atau dunia usaha. Adapun pihak yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan antara lain dari pihak pemerintah yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, pemerintah desa atau kelurahan. Kemudian pihak masyarakat yang terlibat adalah pengelola bank sampah yang terdiri dari ibu-ibu PKK, Karang taruna, atau Pemuda dan juga masyarakat selaku nasabah yang berperan untuk menyetorkan sampahnya. Selain itu juga ada yang melibatkan Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan sebagai pendamping dan berkolaborasi dengan DLH pada saat sosialisasi. Sedangkan pihak swasta atau dunia usaha yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah adalah pengepul barang bekas dan tukang rosok individu yang diserahkan kepada pihak bank sampah untuk bekerja sama dalam menerima sampah yang ditampung oleh bank sampah. Selain itu, ada juga bank sampah yang melibatkan perusahaan atau pihak industri untuk mendukung bank sampah tersebut.

Penelitian Sujiyanto (2016) yang dilakukan di Bank Sampah Malang mengungkapkan bahwa terbentuk dan berjalannya bank sampah disebabkan oleh adanya beberapa faktor pendukung. faktor-faktor yang mendorong proses terbentuk dan berjalannya bank sampah yaitu faktor pemerintah, masyarakat, dan swasta (pengusaha). Dengan demikian, pengelolaan sampah melalui bank sampah

memerlukan kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta sehingga diharapkan dapat lebih terarah karena ada pembagian tugas, wewenang, akuntabilitas dan sebagainya.

Mengingat dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan melibatkan berbagai pihak, maka disini konsep *collaborative governance* menarik untuk dikaji yang mana dengan adanya kolaborasi, maka kegiatan pengelolaan bank sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Morse dan Stephens (2012:567) menjelaskan terdapat sejumlah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan *collaborative governance* antara lain tahap *assessment, initiation, deliberation* dan *implementation*.

Apabila mengacu pada pelaksanaan *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens, maka seharusnya pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah bisa mendukung adanya upaya penanganan dan pengurangan sampah yang lebih baik. Oleh sebab itu para *stakeholders* melakukan sebuah kerjasama untuk dapat melakukan pengurangan dan penanganan sampah secara efektif dan efisien dengan melakukan kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah. Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa hingga saat ini belum ada pengaturan tugas dan peranannya dalam kegiatan pengelolaan bank sampah secara khusus. Tetapi untuk pengaturan tugas dan peranannya dalam pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Namun dalam kenyataannya, peran masyarakat atau pengelola masih terbilang dominan dalam pengelolaan Bank Sampah. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Bank Sampah juga belum maksimal merata di setiap bank sampah. Kemudian laporan secara berkala terkait bank sampah oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan kepada Pemerintah Daerah belum terlaksana secara maksimal. Namun meskipun dengan adanya kondisi tersebut, upaya pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian terkait berbagai fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah BISS Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil, Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan, dan Bank Sampah Kampung Limo Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dibangun penulis, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil, Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan, dan Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai peneliti atas jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil, Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan, dan Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:326) terdapat dua hal kegunaan hasil penelitian yaitu kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti. Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pengetahuan mengenai kajian konsep *collaborative goverance* dalam kajian ilmu administrasi publik
2. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan secara positif bagi pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah terkait pelaksanaan kolaborasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*)

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari penelitian untuk melihat dan menganalisa penelitian yang dilakukan dengan membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Raco (2013:104) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya.

Menurut Raco (2013:104) tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. (Cooper, 2010; Marshall & Rossman, 2011 dalam Creswell, 2016:36)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tinjauan pustaka merupakan merupakan sebuah bahan untuk membantu dalam menganalisis sebuah penelitian berupa konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitian serta kerangka berpikir peneliti dalam membangun konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Adapun konsep dasar yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai kegiatan publik yang terkait dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan yaitu sebagai berikut.

1. Administrasi Publik

Administrasi publik dalam perkembangan paradigma terdapat *Old Public Administration, New Public Management, New Public Service*. Teori administrasi publik perlu dicantumkan dalam tinjauan pustaka ini karena peneliti akan melihat dari sisi *New Public Service* yang mana dalam perspektif *New Public Service* menghendaki peran administrator publik untuk

melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Kemudian partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perspektif *New Public Service* (Denhardt J. V. and R. B. Denhardt, 2003). Kaitannya dengan penelitian ini adalah munculnya bank sampah dikarenakan adanya partisipasi dari masyarakat.

2. *Good Governance*

Good governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World Conference on Governance, UNDP, 1999 dalam Sedarmayanti, 2007: 2). Kemudian *Good Governance* mensyaratkan 3 (tiga) partisipasi dari *public, private, society*. Adanya fokus kajian tersebut maka penulis lebih menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan. Dalam kaitannya dengan bank sampah, penelitian ini melibatkan 3 (tiga) aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Karena itu penulis menggunakan teori ini untuk melihat bagaimana peran masing-masing aktor.

3. *Collaborative Governance*

Collaborative merupakan pendukung pelaksanaan *governance* yang menekankan pada proses kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat maupun lembaga non-pemerintah dalam tindakan kolektif dan kerjasama yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu *assessment, initiation, deliberation, dan implementation* (Morse dan Stephens, 2012:566). Dari kajian tersebut kemudian nanti yang akan dibahas terkait proses kolaboratif dalam penelitian ini yaitu pada sisi *assessment, initiation, deliberation, dan implementation*. Maka dari itu peneliti merasa bahwa perlu menggunakan konsep *collaborative governance* sehingga gambaran yang akan dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan sesuai dengan tujuan awal penelitian ini.

4. Pengelolaan Bank Sampah

Perkembangan pengelolaan bank sampah yang sudah ada memperlihatkan bahwa selama ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif berdasarkan identifikasi, permulaan, musyawarah, dan implementasi. Pada penelitian ini penulis akan melihat dari sisi proses kolaboratif dalam pengelolaan bank sampah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian singkat terkait konsep-konsep yang telah peneliti jelaskan sebagai dasar dalam penelitian ini. Maka penjelasan secara lebih rinci terkait konsep-konsep tersebut sebagai berikut.

2.1 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Nugroho, 2011:132 adalah koordinasi dan upaya individu dan kelompok untuk menjalankan kebijakan publik yang menyangkut kegiatan sehari-hari dari sebuah pemerintahan (*government*). Secara lebih sederhana, Pfifner dan Presthus (dalam Nugroho, 2011:132) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses yang memberikan perhatian pada upaya untuk menjalankan kebijakan publik yang mencakup pengarahannya begitu banyak kecakapan dan teknik dari begitu banyak manusia.

Administrasi publik dalam perkembangannya mengalami beberapa pergeseran paradigma. Denhardt & Denhardt (2003) mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik yaitu *old public administration* (OPA), *new public management* (NPM), dan *new public service* (NPS). Ketiga perspektif tersebut mirip dengan pandangan yang dikemukakan oleh Bovaird dan Elke (dalam Suaedi dan Bintoro, 2010:41) yang menyebutkan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam administrasi publik yaitu *public administration* (PA), *public management* (PM), dan *public governance* (PG). Sedangkan menurut Chemma dalam Keban (2008:37) terdapat 4 fase perkembangan paradigma dalam administrasi publik yaitu fase *Traditional Public Administration*, *Public Management*, *New Public Management* dan paradigma *governance*. Perspektif yang dikemukakan Chemma di atas merupakan sebuah bentuk kesimpulan yang menampilkan indikator perubahan paradigma dalam penyelenggaraan

pemerintahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat dilihat bahwa administrasi publik mengalami pergeseran paradigma dari *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Service* (NPS) hingga sampai pada *Good Governance* yang berkembang sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan paradigma *Good Governance*.

1. *Old Public Administration* (OPA)

Administrasi publik lama (*Old public administration*) merupakan perspektif klasik yang berkembang sejak adanya tulisan Woodrow Wilson (1887) yang berjudul "*the study of administration*" dimana terdapat dua gagasan utama yaitu terkait pemisahan politik dan administrasi dan nilai yang dikedepankan. Paradigma ini berpandangan bahwa organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai suatu sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi. Selain itu berpandangan pula bahwa peran utama administrator publik dibatasi dengan tegas dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan pegawai, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran (Suaedi dan Bintoro, 2010:41-42).

2. *New Public Management* (NPM)

Paradigma selanjutnya yaitu administrasi publik baru (*New Public Management*) yang timbul sebagai dampak dari kurang efektifnya paradigma administrasi sebelumnya dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik. Paradigma ini dipioneer oleh Frederickson dimana lebih menekankan peran dan segi institusi dari Negara dan sektor publik menuju manajemen pelayanan publik yang lebih pro-pasar. Pada paradigma ini terjadi pergeseran dari kebijakan dan administrasi menuju ke manajemen dan meniru gaya manajemen yang diterapkan pada sektor privat. Dimana dalam praktiknya berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambilan keputusan. Selain itu publik diposisikan sebagai pelanggan (*costumer*) sedangkan pemerintah berperan sebagai yang mengarahkan (*steering*) (Mutiarin dan Arif, 2014:120). Sedangkan Chemma (dalam Keban, 2008:37) menjelaskan bahwa NPM diarahkan

pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, dan orientasi pada hasil, *outsourcing* dan *contractout*, serta promosi etika dan anggaran serta manajemen berbasis kinerja.

3. *New Public Service* (NPS)

Menurut Denhardt dan Denhardt (dalam Mutiarin dan Arif, 2014:143), paradigma *Old Public Administration* dan *New Public Management* kurang relevan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai dengan administrasi publik. Denhardt dan Denhardt mengemukakan paradigma baru yang kemudian disebut sebagai *New Public Service* (NPS) yang berakar dari beberapa teori sebagai berikut.

1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; dimana perlunya melibatkan warga negara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik.
2. Model komunitas dan masyarakat sipil; dimana terdapat akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun *social trust*, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.
3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru; dimana administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu sosial lainnya.
4. Administrasi negara postmodern; dimana lebih mengutamakan dialog (diskursus) terhadap teori dalam memecahkan persoalan publik dari pada menggunakan satu perspektif yang dianggap terbaik (Mutiarin dan Arif, 2014:143).

Suaedi dan Bintoro (2010:44) menjelaskan bahwa perspektif NPS menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam proses

perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan guna menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, tugas administrator publik tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama bagi administrator publik sekaligus sebagai fasilitator bagi perumusan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. NPS juga mengakui bahkan menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pemerintahan, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perspektif NPS.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perspektif NPS mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara dalam konteks *governance*. Perspektif *New Public Service* dilakukan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melibatkan masyarakat dan swasta dalam penanganan sampah melalui pengelolaan bank sampah.

2.2 Good Governance

Pentingnya penerapan *Good Governance* mulai meluas di beberapa negara mulai tahun 1980, dan di Indonesia mulai dikenal secara lebih dalam pada tahun 1990-an sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan dan dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam system administrasi publik. Sedarmayanti (2009:283) menjelaskan wujud dari *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif, dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. *Good governance* meliputi sistem administrasi negara, sehingga upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya untuk melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Sedarmayanti (2009:273) menjelaskan bahwa istilah *Governance* (keperintahan) berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan” yang dengan demikian bahwa *governance* adalah suatu kegiatan (proses). Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Lebih lanjut Sedarmayanti (2009: 270) mengartikan *governance* sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya yang mana *governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Sedangkan Kooiman, 1993 (dalam Sedarmayanti, 2009:276), mengartikan *governance* sebagai “serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut.” dan Rochman (dalam Sedarmayanti, 2009:276) menyatakan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) (dalam Sedarmayanti, 2009:275), “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*” (Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).

Menurut Sedarmayanti (2009:277), ciri tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) dapat diformulasikan sebagai berikut.

1. Mengikutsertakan semua masyarakat.
2. Transparan dan bertanggung jawab.
3. Efektif dan adil.

4. Menjamin adanya supremasi hukum.
5. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
6. Memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Sedangkan UNDP (1997) dalam Sedarmayanti (2009:282) mengidentifikasi lima karakteristik pemerintahan yang baik (*Good governance*) sebagai berikut.

1. Interaksi, dengan melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, politik.
2. Komunikasi, yang terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
3. Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri merupakan kunci keberlangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekeacauan yang disebabkan adanya dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
4. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
5. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani.

Lima karakteristik dalam *Good Governance* tersebut mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stakeholders*, dengan menerapkan prinsip *Good Governance*, yaitu: partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi misi.

Selanjutnya Sedarmayanti (2009: 280) menjelaskan bahwa pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Negara/Pemerintahan, sektor swasta, masyarakat madani. Sama halnya dengan Sumarto (2009:25) yang menyebutkan bahwa dalam konsep *governance* paling dasar terdapat tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) dimana fungsi dan peran dari masing-masing *stakeholder* akan dijelaskan di bawah ini.

2.2.1 Pemerintah atau Negara (*State*)

Negara (*state*) sebagai salah satu unsur *governance*, yang di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik dimana *state* menjadi domain yang memegang peran paling penting dalam mewujudkan *Good Governance*, karena adanya fungsi peraturan yang memfasilitasi domain sektor dunia usaha (swasta) dan masyarakat, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini (Sedarmayanti, 2010:280-281).

Kemudian Sedarmayanti (2009:279) juga menjelaskan bahwa “pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif yaitu presiden beserta pelaksana pemerintahan, legislatif yaitu DPR dan MPR, serta yudikatif yaitu lembaga peradilan dan atau pengadilan. Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah.” Lebih lanjut Sedarmayanti (2009:293) menyebutkan bahwa institusi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan *Good Governance* adalah untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Hal ini juga disampaikan oleh Sumarto (2009:25) yang menyebutkan bahwa institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif.

2.2.2 Masyarakat (*Civil Society*)

Masyarakat dalam konsep *governance* berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. *Society* meliputi

lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain (Sedarmayanti, 2009:293). Kemudian Sumarto (2003:27) mengungkapkan bahwa organisasi *civil society* di Indonesia telah berbuat cukup banyak untuk mendorong inovasi dalam penyelenggaraan *governance*.

Banyak organisasi yang memilih isu partisipasi sebagai strategi awal untuk mewujudkan *good governance*, mengingat bahwa partisipasi adalah salah satu elemen penting dalam *governance*. Bentuk kegiatan yang dilakukan organisasi *civil society* untuk mendorong partisipasi sangat bervariasi, mulai dari kegiatan penelitian dan advokasi kebijakan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan metode dan teknik partisipasi. Lingkupnya pun berbeda-beda. Seperti yang bergerak di tingkat nasional, yaitu Forum Inovasi dan Kepemrintahan yang Baik (FIKB), Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Asosiasi Konsultan Pembangunan Pemukiman Indonesia (AKPPI), Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), dan Indonesian Partnership o Local Governance Initiative (IPGI) (Sumarto, 2003:27-30). Selain organisasi *civil society* yang bergerak di tingkat nasional, banyak pula institusi yang bergerak di tingkat daerah, seperti yang bergerak di bidang lingkungan di Kabupaten Pasuruan adalah Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan.

2.2.3 Sektor Swasta (*Private Sector*)

Menurut Sumarto (2009:27) dalam mewujudkan *good governance* sektor swasta adalah kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah maupun *civil society*. Namun pihak swasta kurang menyadari perannya dalam mewujudkan *good governance* dan bahkan sering merasa dimusuhi sehingga lebih banyak menghindar untuk terlibat dalam berbagai urusan yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan kepentingan bisnisnya.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:280-293) sektor dunia usaha berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multi nasional koperasi dan sebagainya. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor

informal lain di pasar. Ada pula yang beranggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat, namun sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena mempunyai pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun non formal. Pelaku sektor swasta yang aktif dalam interaksi dalam pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

Adanya unsur-unsur atau tiga aktor utama dalam *governance* yang telah dijelaskan di atas, *governance* lebih menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta (Sedarmayanti, 2009:302).

Morse dan Stephens (2012:566) berpendapat bahwa “*collaborative is added as a modifier to governance to emphasize the nature of the process by which the various societal actors engage in collective action*”. (kolaborasi merupakan pendukung pelaksanaan *governance* yang menekankan kealamian proses kesepakatan dari berbagai aktor sosial (*stakeholder*) yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat maupun lembaga non-pemerintah dalam tindakan kolektif dan kerjasama).

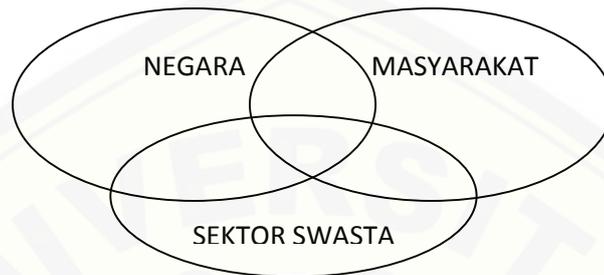
Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa kolaborasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama antar individu, individu dengan organisasi atau antar organisasi dalam rangka mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah secara bersama.

Keban (2007) dalam Mutiarin dan Arif (2014:199) menyebutkan bahwa manajemen kolaboratif mampu menjadikan birokrasi berkinerja lebih baik dan institusi yang menjalankannya mendapat benefit antara lain sebagai berikut.

1. Dapat dibentuk kekuatan yang lebih besar, sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar pula dalam mengatasi permasalahan yang kompleks.
2. Dapat dicapai kemajuan yang lebih tinggi karena adanya pertukaran informasi, pengetahuan dan *technical know-how*.
3. Kolaborasi menjadikan lebih berdaya.
4. Dapat mereduksi dan mencegah konflik.
5. Kolaborasi mampu menumbuhkan rasa keadilan dan saling percaya.

6. Kolaborasi mendorong upaya keberlanjutan pemecahan masalah secara bersama.
7. Kolaborasi mampu mengikis ego daerah dan sektoral.

Adapun hubungan antar ketiga domain dalam *governance* dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Hubungan Tiga Domain dalam *Governance*
(Sumber: Sedarmayanti, 2009)

Apabila melihat gambar di atas dapat dilihat bahwa ketiga unsur dalam *governance* yaitu Pemerintah atau Negara, Masyarakat, dan Sektor Swasta bekerja sama dengan setiap domain memegang peranan penting dalam mewujudkan *Good Governance*.

2.3 Collaborative Governance

Dalam praktik administrasi publik, kolaborasi merupakan strategi baru pelaksanaan pemerintahan dalam hal untuk melaksanakan pengambilan dan implementasi kebijakan dengan mengedepankan konsensus dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik atau mengelola program publik.

2.3.1 Definisi *Collaborative Governance*

Ansel dan Gash (2007:544) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.” (aransemen pengaturan di

mana satu lembaga atau lebih lembaga publik melibatkan *stakeholder* non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik)

Definisi *collaborative governance* di atas menurut Ansel dan Gash (2007:544-545) menekankan pada enam kriteria penting yaitu sebagai berikut:

1. Forum diprakarsai oleh lembaga publik atau instansi;
2. Peserta dalam forum tersebut termasuk aktor non-pemerintah;
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya dikonsultasikan dengan lembaga publik.
4. Forum terorganisir secara resmi dan memenuhi unsur-unsur kolektif;
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak dapat dicapai dalam praktiknya; dan
6. Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Sedangkan Emerson dan Nabatchi. (2015:18) mendefinisikan “*collaborative governance as the processes and structures of public policy decision making and management that engage people across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private, and civic spheres to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished*” (*collaborative governance* sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang di seluruh batas badan publik, tingkat pemerintahan, dan / atau publik, swasta, dan lingkup sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain).

Emerson dkk (2011:3) tidak membatasi *collaborative governance* hanya formal, pengaturan yang tidak membatasi *collaborative governance* hanya bersifat formal, pengaturan yang diprakarsai oleh Negara, dan keterlibatan antara Pemerintah dan nonpemerintah. Sebagai contoh, definisi menurut Emerson dkk mencakup *multipartner governance* yang dapat mencakup kerjasama antara Negara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat, serta pemerintahan gabungan seperti kemitraan antara publik dengan swasta, kemitraan antara swasta

dengan sosial, dan *co-management regimes* (Agrawal dan Lemos, 2007 dalam Emerson dkk).

2.2.2 Proses *Collaborative Governance*

Memahami proses kolaborasi sebagai strategi dalam pelaksanaan *governance* berarti harus memahami mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses kolaborasi itu. Tahapan *Collaborative Governance* yang dijelaskan oleh Morse dan Stephens (2012:567) terdiri dari tahap *assessment*, *initiation*, *deliberation*, dan *implementation*. Berikut ini merupakan tabel tahapan dalam pelaksanaan kolaborasi *governance* menurut Morse dan Stephens (2012:567) pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tahapan-tahapan *Collaborative Governance*

No	Assessment	Initiation	Deliberation	Implementation
1	<i>Is collaboration necessary?</i>	<i>How to frame the issue?</i>	<i>How to develop effective working group?</i>	<i>Who will do what?</i>
2	<i>Are preconditions in place?</i>	<i>How to engage stakeholders?</i>	<i>What ground rules?</i>	<i>How to broaden support?</i>
3	<i>Who are the stakeholders?</i>	<i>Who/what else is needed?</i>	<i>How to invent options and decide?</i>	<i>What kind of governance structure?</i>
4	<i>Who might fill key roles (sponsor, convener, and facilitator)?</i>	<i>What kind of process?</i>	<i>How to facilitate mutual learning?</i>	<i>How to monitor progress?</i>

Sumber: *Teaching Collaborative Governance : Phases, Competencies, and Case-Based Learning*". Journal of Public Affairs Education. 2012:567

Tahapan pertama dalam proses kolaborasi adalah penafsiran (*assessment*). Tahapan ini membahas tentang kondisi awal yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara *stakeholder*. Kegiatan yang dilaksanakan dalam proses ini yaitu sebagai berikut.

- a. Memahami faktor-faktor kontekstual seperti sejarah kerjasama dan insentif kelembagaan atau kendala kerjasama (Ansell dan Gash, 2008; Bryson et al, 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568));
- b. Identifikasi stakeholder (Chrislip, 2002; Gray, 1989; Linden, 2010; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:568));

- c. Kesepakatan umum mengenai masalah atau tujuan bersama yang hendak dicapai (Bryson et al, 2006; Gray, 1989; Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2012:568)); dan
- d. Rasa urgensi atau komitmen melaksanakan kolaborasi untuk menciptakan solusi. (Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2012:568)).

Tahapan penilaian tersebut dalam rangka mengidentifikasi apakah kolaborasi dibutuhkan dan memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak.

Setelah tahapan penafsiran selesai lalu berlanjut pada tahapan inisiasi. Tahapan ini mencakup identifikasi *convener* dan peran sponsor yang mungkin akan menjadi sumber daya manusia dan sumber dana, kegiatan rapat *stakeholder* untuk membangun kelompok kerja dalam *process design*. (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Luke 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:568)). Tahap inisiasi lebih menekankan pada soft skill penyelenggaraan kerja sama, membangun kerjasama dan membentuk tim (Alexander, 2006 dalam Morse dan Stephens, 2012:568).

Tahapan selanjutnya setelah tahapan inisiasi berhasil membangun komitmen antar stakeholder untuk bekerja sama adalah tahapan *deliberation* (musyawarah). Tahapan ini mencakup kegiatan membangun aturan dasar atau menetapkan peraturan dasar (Gray, 1989; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:568)). Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan musyawarah dan dialog sebagai bagian proses pembelajaran bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 2008 dalam Morse dan Stephens (2012:568)). Akhirnya, tahapan musyawarah mencapai kesepakatan kolaboratif atau perjanjian kerjasama. (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Luke 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:568)).

Tahapan terakhir dalam membangun kolaborasi *governance* adalah implementasi yang termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan berikut.

- a. Merancang struktur pemerintahan (*governance*) (Ansell dan Gash, 2008; Bryson et al, 2006; Gray, 1989; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569));

- b. Membangun dukungan konstituen (Chrislip, 2002; Gray, 1989; Linden, 2010; Luke 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569));dan
- c. Memantau perjanjian atau kesepakatan, mengevaluasi hasil dan mengelola kerja sama (Chrislip, 2002; Gray, 1989; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569)).

Tahapan ini merupakan suatu tahapan yang dapat menentukan apakah kolaborasi dapat terus dilangsungkan atau harus diakhiri ketika dalam proses kerjasama terjadi tetapi permasalahan yang memungkinkan kolaborasi tidak dapat dilanjutkan.

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan semua tahapan dari *collaborative governance* untuk menggambarkan bagaimana proses kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan.

2.4 Pengelolaan Bank Sampah

2.4.1 Definisi Pengelolaan

Pengelolaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *management*, sehingga dalam bahasa Indonesia pengelolaan diartikan sama dengan manajemen. Menurut Arifin Abdurrachman dalam Puwanto (2009) yang dikutip oleh Saifuddin (2014:54) mengemukakan bahwa manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang lain sebagai pelaksana, sedangkan pengelolaan itu sendiri memiliki pengertian sebagai penyelenggaraan atau pengurusan agar apa yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

Kemudian menurut Andrew F. Sikul (dalam Saifuddin, 2014:53) mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara efisien.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan dengan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber lainnya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengelolaan bank sampah.

2.4.2 Pengertian Bank Sampah

Bank sampah menurut Munasya (2016) adalah sebuah wadah atau tempat yang diperuntukkan untuk mengurangi volume sampah dengan cara mengelola dan memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasilan tambahan. Selanjutnya Munasya menjelaskan bahwa cara kerja dari bank sampah adalah dengan mengumpulkan sampah kering atau non organik untuk dijual kepada pengepul yang ditunjuk.

Sedangkan Menurut Utami (2013:2) Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa semua kegiatan dalam sistem bank sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Seperti halnya bank konvensional, bank sampah juga memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat dan bahkan bisa juga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus dipilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah. Dengan demikian, sistem bank sampah bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat.

2.4.3 Pelaksana Bank Sampah

Pelaksana bank sampah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 pada Pasal 7

bahwa kegiatan 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) melalui bank sampah dilaksanakan oleh:

- a. menteri;
- b. menteri terkait lainnya;
- c. gubernur;
- d. bupati/walikota; dan/atau
- e. masyarakat.

2.4.4 Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

Sampah atau *waste* (inggris) adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis dimana bentuknya bisa berada dalam setiap fase materi yaitu padat, cair, dan gas. (Hartono, 2008:6)

Menurut Ecolink (1996) dalam Basriyanta (2007:18), “sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.” Sedangkan Basriyanta (2007:18) mengartikan sampah sebagai barang yang dianggap sudah tidak dipakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai apabila dikekola dengan prosedur yang benar.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut (Basriyanta (2007:18-19).

1. Sampah organik

Sampah organikanik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah organik dengan dapat diuraikan dengan mudah melalui proses alami. Contoh dari sampah organik sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-

produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikro-organisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

Suryati (2009:17) menjelaskan bahwa terdapat tiga cara untuk mengatasi masalah sampah yang dikenal dengan prinsip 3R, yaitu *reduce* (kurangi), *reuse* (gunakan kembali), dan *recycle* (daur ulang). Penjelasan Prinsip 3R tersebut sebagai berikut.

1. *Reduce* (Mengurangi)

Prinsip *Reduce* dilakukan dengan sebisa mungkin mengurangi penggunaan barang antara lain menghindari pembelian barang yang berpotensi menghasilkan banyak sampah, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk yang bisa diisi ulang (*refill*), atau mengurangi kantong plastik dengan membawa tas sendiri saat berbelanja.

2. *Reuse* (Penggunaan Kembali)

Barang yang dianggap sampah dari kegiatan pertama sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan berikutnya, baik untuk fungsi yang sama maupun berbeda. Sehingga prinsip *Reuse* dilakukan dengan sebisa mungkin memanfaatkan atau menggunakan kembali barang yang telah digunakan sebelumnya. Misalnya, menggunakan kembali kertas bekas untuk membungkus kado atau membuat amplop. Hal ini dapat memperpanjang umur dan waktu pemakaian barang sebelum ke tempat sampah.

3. *Recycle* (Mendaur Ulang)

Prinsip *recycle* dilakukan dengan sebisa mungkin mendaur ulang sampah. Usaha ini dilakukan dengan mengubah barang bekas menjadi benda lain yang lebih berguna dan layak pakai. Misalnya mengubah botol, gelas plastik, dan kaleng biskuit menjadi vas bunga.

Berdasarkan berbagai uraian diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan bank sampah adalah upaya mengelola sampah berbasis 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan

Recycle) melalui bank sampah dengan memberdayakan pihak lain untuk mencapai tujuannya yaitu melakukan pemilahan, penanganan, dan pengurangan sampah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan kerangka berfikir yang digunakan peneliti untuk mengkaji atau telaah pustaka terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai alat pembanding terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu

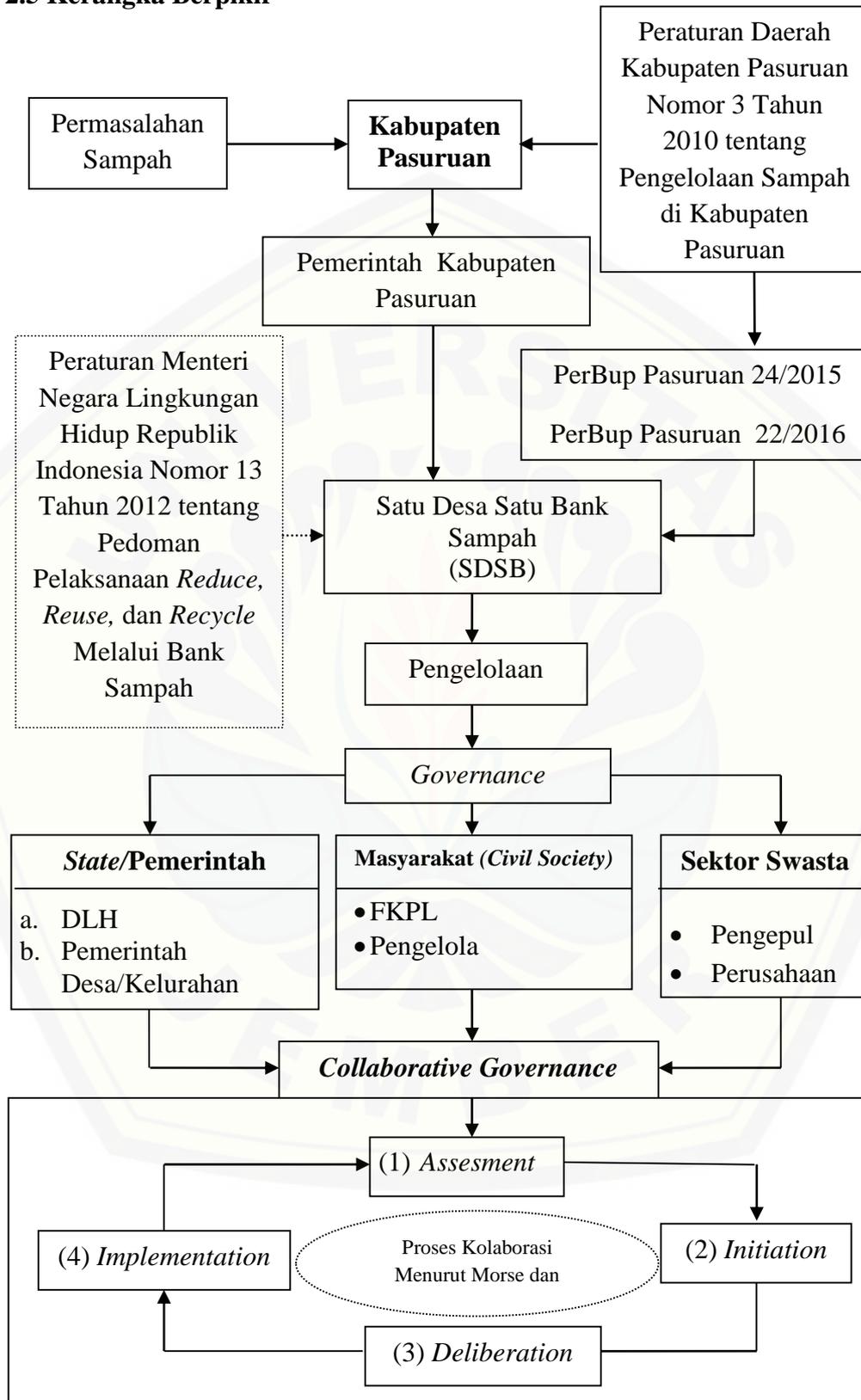
No	Nama peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Yuyun Wahyudiantik	2013	<i>Collaborative Governance</i> Pengolahan Limbah Sapi (Studi: Kolaborasi <i>Stakeholders</i> dalam Pengolahan Limbah Sapi menjadi Biogas di Kabupaten Ngawi)	Kolaborasi masih bersifat semiformal, belum ada legitimasi/keepakatan tertulis yang secara spesifik yang ditujukan untuk program biogas, namun secara praktek sudah dilaksanakan. Komitmen dan kerja dari masing-masing <i>stakeholders</i> masih diwarnai kekurangan. Sedangkan faktor penghambat yang muncul adalah terkait perbedaan cara pandang, pergantian kebijakan karena pergantian pemimpin dan sumber daya finansial.
2	Nova Apriani Bernadetta Hutagalung	2014	<i>Collaborative Governance</i> dalam Manajemen Promosi Pariwisata Danau Toba Sumatera Utara	<i>Collaborative Governance</i> yang dilakukan oleh pemerintah (Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 Kabupaten yang mengatur kawasan Danau Toba, swasta (DMO dan PHRI) dan masyarakat sekitar kawasan Danau Toba dalam mempromosikan pariwisata Danau Toba sudah mulai terjalin hanya saja pembagian peran kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat kurang seimbang sehingga masing-masing <i>stakeholders</i> memiliki jalannya masing-masing.
3	Bagus Nuari Harmawan	2016	<i>Collaborative Governance</i> dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i>	Kerjasama yang terjalin antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Manajemen <i>Jember Fashion Carnival</i> dan Dewan Kesenian Blambangan terjalin melalui beberapa tahapan seperti dialog tatap muka, membangun <i>trust</i> , menjalin komitmen, membangun kesepahaman bersama menghasilkan output kerjasama. Faktor kebudayaan dan institusi menjadi salah satu hambatan membangun <i>collaborative governance</i> dalam pelaksanaan <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i> .
4	Risza Damayanti, Sri Susilih	2014	Efektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah (Studi tentang	Efektivitas pengelolaan sampah melalui bank sampah dilihat dengan menggunakan lima indikator yaitu kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan, peraturan/hukum, dan peran serta masyarakat.

No	Nama peneliti	Tahun	Judul	Hasil
5	Sujiyanto	2016	Bank Sampah di Kecamatan Sukmajaya, Depok) Analisis Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Malang	Terdapat faktor-faktor yang mendorong terbentuk dan berjalannya Bank Sampah yaitu faktor pemerintah, masyarakat, dan swasta (pengusaha).
6	Prisa Ambar Shentika	2016	Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo	Kinerja bank sampah belum mencapai maksimal karena program bank sampah belum mencapai ke pelosok-pelosok daerah/desa. Selain itu minimnya sosialisasi oleh BLH dan Pemerintah Kota Probolinggo menyebabkan kepedulian masyarakat pedesaan terhadap pengelolaan sampah masih kurang.

Sumber: Hasil Kajian Peneliti, 2018

Penelitian terdahulu pada tabel 2.2 di atas digunakan oleh peneliti sebagai acuan kerangka berfikir untuk mengkaji terkait permasalahan yang diteliti. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas. Persamaan antara beberapa penelitian di atas terletak pada fokus penelitian yaitu *collaborative governance* dan bank sampah. Namun yang membedakan antara penelitian yang telah dilakukan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini peneliti lebih menekankan fokus membahas pada proses kolaborasi antar *governance stakeholders* yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan bank sampah melalui tahapan-tahapan *collaborative governance* menurut Morse dan Stephens (2012) yaitu tahap *assessment, initiation, deliberation* dan *implementation*.

2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2.3 Alur Pikir Penelitian (Sumber: diolah Peneliti, 2018)

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Arikunto (2006:1630) metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Usman dan Akbar (2009:41) juga mendefinisikan bahwa metode ilmiah adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa metode penelitian ialah suatu cara untuk mengumpulkan data oleh peneliti dengan langkah-langkah yang sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah dan dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Pendekatan penelitian;
- b. Tempat dan waktu penelitian;
- c. Desain penelitian;
- d. Teknik dan alat perolehan data;
- e. Teknik menguji keabsahan data;
- f. Teknik analisis dan penyajian data;

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Satori dan Komariah (2014:23) menggambarkan bahwa penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan di mana tempat kejadiannya. Pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif ini diarahkan pada proses penggambaran yang dilakukan secara mendalam tentang situasi atau proses

yang diteliti (Idrus, 2009:24). Penjelasan di atas sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu memberikan gambaran terkait bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kelurahan Kiduldalem, Desa Pleret, dan Kelurahan Jogosari Kabupaten Pasuruan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di tiga tempat antara lain sebagai berikut:

1. Bank Sampah BISS Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil;
2. Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan; dan
3. Bank Sampah Kampung Limo Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek.

Alasan peneliti memilih Bank Sampah BISS, Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan, dan Bank Sampah Kampung Limo karena sebelum adanya bank sampah-bank sampah tersebut terdapat permasalahan yang dialami sebagai berikut.

- a. Kelurahan Kiduldalem merupakan wilayah perkotaan yang memiliki banyak potensi ekonomi diantaranya Pasar, Plaza, Pengrajin, dan sebagainya. Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Kelurahan Kiduldalem periode 2011-2017, pada awal kepemimpinan bapak Bambang EP selaku Kepala Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Kiduldalem sudah mendapatkan predikat kumuh dari Dinas Kesehatan.
- b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Desa Pleret terhadap lingkungan yang ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan seperti membuang sampah ke sungai, membakar sampah serta tidak ada yang mengkoordinir sampah-sampah dari rumah tangga.
- c. Lingkungan Rajawali Kelurahan Jogosari memiliki permasalahan terkait pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang sering

mengalami keterlambatan. Selain itu karena sebelum adanya bank sampah, Lingkungan Rajawali terkenal dengan lingkungannya yang kumuh.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan berbagai upaya untuk mengatasi lingkungan dengan melibatkan beberapa pihak salah satunya melalui bank sampah. Setelah adanya bank sampah kondisi lingkungan menjadi bersih, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat, serta mampu memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada Bulan Maret-Mei 2018. Rentang waktu yang diteliti adalah dari sejak didirikannya Bank Sampah yang bersangkutan.

3.3 Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian, informan penelitian, data dan sumber data, serta menilai kualitas data yang digunakan.

3.3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi peneliti dalam pengumpulan data sehingga dalam proses pengumpulan data sesuai dengan rumusan permasalahan yang ditetapkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada tahapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah yaitu tahap penilaian, inisiasi, deliberasi dan implementasi di Bank Sampah BISS Kelurahan Kiduldalem, Bank Sampah Kampung Limo Desa Pleret, dan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan Kelurahan Jogosari.

3.3.2 Penentuan Informan Penelitian

Posisi informan dalam penelitian kualitatif sangat penting, dimana informan merupakan subjek penelitian yang digunakan sebagai pemberi informasi terkait topik penelitian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Idrus (2009:91) yang menyatakan bahwa subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data

penelitian. Selanjutnya Idrus juga menjelaskan bahwa informan adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:96), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan untuk mendapatkan informasi terkait *collaborative goverance* dalam pengelolaan bank sampah yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data informan penelitian

No	Narasumber	Jabatan
1	Bapak Sari Haryadi	Staf Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
2	Bapak Bambang EP	Kepala Kelurahan Kiduldalem periode 2011-2017
3	Bapak Agus Supriono	Kepala Desa Pleret
4	Bapak Imam Pamuji, SE	Kepala Kelurahan Jogosari
5	Bapak Fatoni	Ketua Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan
6.	Ibu Maulida	Sekretaris Bank Sampah BISS
7	Ibu Nurul Qomariyah	Ketua Gabungan Bank Sampah “Bersinar” Kelurahan Kiduldalem
8	Ibu Peny Sulistyو	Direktur Bank Sampah Kampung Limo
9	Bapak Sugeng Utomo	Ketua Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan
10	Bapak Agus Wijaya	Wakil Ketua RT.3 RW.6 Gang Rajawali
11	Ibu Ardiani	Staf Kelurahan Kiduldalem
12	Bapak Sahri	Ketua RT.3 RW.5 Desa Pleret
13	Ibu Habibah	Sekretaris Bank Sampah Kampung Limo
14	Bapak M. Soleh	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pleret
15	Bapak Arip	Pengurus Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan (RPL)
16	Bapak Rijono	Sekretaris Desa Pleret
17	Ibu Yasir	Masyarakat RW.5 Desa Pleret
18	Bapak Muhammad Soleh	Pengepul tetap Bank Sampah Kampung Limo
19	Ibu Muawaroh	Pengurus Bank Sampah BISS (Bendahara II)
20	Ibu Bia	Masyarakat Kelurahan Jogosari RT.3 RW.6 Gang Rajawali

Sumber: diolah peneliti, 2018

2.3.3 Data dan Sumber Data

Idrus (2009:61) mendefinisikan data sebagai segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya Idrus juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, “data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya”. Sedangkan sumber data adalah asal peneliti memperoleh data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini dari hasil wawancara mendalam terhadap beberapa sumber dan observasi di lapangan. Berikut disajikan rincian data primer yang peneliti dapatkan selama penelitian.

Tabel 3.2 Hasil data primer penelitian

No	Sumber data	Data primer yang diperoleh
1	Bapak Sari Haryadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum Bank Sampah di Kabupaten Pasuruan b. Sosialisasi yang pernah dilakukan terkait pengelolaan sampah c. Sarana prasarana yang pernah diberikan kepada pengelola bank sampah d. Tata cara pengelolaan bank sampah secara umum
2	Bapak Bambang EP	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum Kelurahan Kiduldalem b. Sejarah kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kiduldalem c. Sejarah berdirinya Bank Sampah di Kelurahan Kiduldalem d. Tujuan dibentuknya Bank Sampah di Kelurahan Kiduldalem e. Kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan sampah yang pernah dilakukan oleh Bank Sampah f. Kerjasama yang pernah dilakukan dengan CSR dan pengajuan proposal bantuan sarana dari Pemerintah Provinsi g. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang pernah dilakukan Pemerintah Kelurahan Kiduldalem terhadap Bank Sampah di Kelurahan Kiduldalem

No	Sumber data	Data primer yang diperoleh
3	Ibu Nurul Qomariyah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah berdirinya Bank Sampah di Kelurahan Kiduldalem b. Kondisi Bank Sampah di Kelurahan Kiduldalem saat ini c. Kegiatan yang pernah dilakukan pengelola bank sampah dengan kepala Kelurahan Kiduldalem d. Permodalan Bank Sampah di Kiduldalem e. Kendala yang menghambat pengelolaan Bank Sampah
4	Ibu Maulida	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah Bank Sampah BISS b. Kepengurusan Bank Sampah BISS c. Kegiatan operasional Bank Sampah BISS d. Permasalahan yang ada di Bank Sampah BISS e. Kegiatan yang pernah dilakukan pengelola Bank Sampah dengan Kepala Kelurahan
5	Ibu Ardiani	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah Bank Sampah di Kelurahan Kiduldalem b. Pengajuan proposal bantuan sarana prasarana berupa timbangan yang pernah dilakukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
6.	Bapak Agus Supriyono	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi lingkungan dan masyarakat Desa Pleret b. Sejarah kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Desa Pleret c. Sejarah berdirinya Bank Sampah Kampung Limo d. Pembangunan gedung bank sampah menggunakan Dana Desa e. Kegiatan yang pernah dilakukan Pemerintah Desa Pleret bersama pengelola Bank Sampah Kampung Limo
7	Ibu Peny Sulistyio	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah berdirinya Bank Sampah Kampung Limo b. Sejarah kerja sama dengan Pemerintah Desa dan Pengepul sampah c. Kegiatan yang pernah dilakukan pengelola bank sampah dengan kepala Desa Pleret d. Permodalan Bank Sampah Kampung Limo e. Kepengurusan Bank Sampah Kampung Limo
8	Ibu Habibah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah berdirinya Bank Sampah Kampung Limo b. Kepengurusan Bank Sampah Kampung Limo c. Kerja sama antara pengelola Bank Sampah Kampung Limo dengan Bapak Soleh selaku pengepul sampah d. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus Bank Sampah Kampung Limo
9	Bapak Soleh	Peran LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dalam pengelolaan Bank Sampah Kampung Limo
10	Ibu Yasir	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah pembelian lahan gedung Bank Sampah Kampung Limo b. Kegiatan Bank Sampah Kampung Limo
11	Bapak Rijono	Pembangunan gedung Bank Sampah Kampung Limo menggunakan Dana Desa Pleret
12	Bapak M. Soleh	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah kerja sama pengepul UD.Ridho Rizki dengan Bank Sampah Kampung Limo b. Kegiatan pengambilan sampah di Bank Sampah Kampung Limo c. Perjanjian harga sampah

No	Sumber data	Data primer yang diperoleh
13	Bapak Sahri	a. Peran tokoh masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Kampung Limo b. Kegiatan Bank Sampah Kampung Limo
14	Bapak Imam Pamuji	a. Kondisi lingkungan Gang Rajawali Kelurahan Jogosari b. Sejarah berdirinya Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan c. Peran Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan bank sampah Rajawali Peduli Lingkungan
15	Bapak Agus Wijaya	a. Kondisi Lingkungan RT.3 RT.6 sebelum adanya bank sampah Rajawali Peduli Lingkungan b. Sejarah kolaborasi pemuda dengan FKPL Kabupaten Pasuruan
16	Bapak Sugeng Utomo	a. Gambaran umum kondisi lingkungan Rajawali RT.3 RW.6 saat ini dan sebelum berdirinya bank sampah b. Sejarah berdirinya Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan c. Kegiatan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan d. Kegiatan yang pernah dilakukan pengelola Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan dengan FKPL Kabupaten Pasuruan
17	Bapak Arip	a. Sejarah kolaborasi antara pemuda dengan masyarakat RT.3 RW.6 dan FKPL Kabupaten Pasuruan b. Permodalan Bank Sampah Rajawali Peduli lingkungan c. Kepengurusan Bank Sampah Rajawali Peduli lingkungan
18	Bapak Fatoni	a. Sejarah kolaborasi antara pemuda Rajawali dengan FKPL Kabupaten Pasuruan b. Peran FKPL dalam pengelolaan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan c. Kegiatan yang pernah dilakukan FKPL dengan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan
19	Ibu Bia	Kondisi Lingkungan RT.3 RW.6 Kelurahan Jogosari
20	Ibu Muawaroh	Sejarah kerja sama antara pengelola bank sampah BISS dengan tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai pengepul

Sumber: diolah peneliti, 2018

2. Data Sekunder

Data primer digunakan sebagai pendukung dari data primer. Sumber data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari hasil dokumentasi. Berikut disajikan data sekunder yang didapatkan peneliti selama penelitian.

Tabel 3.3 Hasil data sekunder penelitian

No	Sumber data	Data sekunder yang diperoleh
1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	a. Data bank sampah di Kabupaten Pasuruan b. Tanda terima bantuan sarana prasarana c. Surat edaran pembentukan bank sampah
2	Pemerintah Kelurahan Kiduldalem	a. Profil Kelurahan Kiduldalem b. Dokumentasi kegiatan-kegiatan bank sampah di Kiduldalem
3	Sekretaris Bank Sampah BISS	a. SK pengelolaan bank sampah/bank sampah b. Pembukuan pengelolaan Bank Sampah BISS c. Tata tertib Bank Sampah BISS
4	Pemerintah Desa Pleret	Profil Desa Pleret
5	Pengurus Bank Sampah Kampung Limo	a. SK pengelolaan bank sampah/bank sampah b. Pembukuan pengelolaan Bank Sampah Kampung Limo c. Notulensi rapat d. Data keuangan pembangunan gedung Bank Sampah Kampung Limo e. Dokumentasi kegiatan-kegiatan Bank Sampah Kampung Limo
6.	Pemerintah Kelurahan Jogosari	Profil Kelurahan Jogosari
7	Ketua Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan	Profil Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan
8	Pengurus Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan (RPL)	a. SK pengelolaan bank sampah/bank sampah Rajawali Peduli Lingkungan b. Pembukuan pengelolaan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan c. Daftar hadir rapat/pertemuan d. Proposal permohonan sarana prasarana

Sumber: diolah peneliti, 2018

3.4 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2014: 320) pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Hal ini dikarenakan keabsahan data tidak dapat dipisah dari penelitian kualitatif dan keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Adapun beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data disajikan dalam tabel 3.4

Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
<i>Kredibilitas</i> (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
<i>Transferability</i> (keteralihan)	8. Uraian rinci
<i>Auditability</i> (kebergantungan)	9. Audit kebergantungan
<i>Comfirmability</i> (kepastian)	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan Triangulasi. “Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.” (Satori dan Komariah, 2014:94). Sedangkan Moleong (2014:332) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Satori dan Komariah (2014:170-171) menjelaskan bahwa terdapat tiga macam triangulasi yaitu triangulasi dari sumber atau informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber adalah meningkatkan kepercayaan penelitian dengan cara mencari data dari sumber beragam yang masih terkait satu sama lain. Kemudian triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dan triangulasi waktu adalah mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan atau kebenaran suatu data dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda (Satori dan Komariah, 2014:170-171).

Adapun triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber atau informan dan triangulasi teknik. Berikut disajikan hasil informasi yang diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Tabel 3.5 Daftar informasi penelitian yang telah diuji

No	Informasi yang dibutuhkan	Teknik triangulasi	Gambaran hasil
1	Sejarah berdirinya	Triangulasi	Bank Sampah BISS didirikan pada

No	Informasi yang dibutuhkan	Teknik triangulasi	Gambaran hasil
	bank sampah BISS, Bank Sampah Kampung Limo, dan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan	sumber data dan triangulasi teknik	tanggal 22 Februari 2013, Bank Sampah Kampung Limo didirikan pada tanggal 3 April 2014, dan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan didirikan pada tanggal 7 Februari 2017 dengan berdasarkan hasil musyawarah.
2	Sumber dana Bank Sampah Kampung Limo	Triangulasi sumber dan triangulasi teknik	Sumber dana yang diperoleh Bank Sampah Kampung Limo berasal dari Dana Desa dari Pemerintah Desa Pleret, Donatur dan iuran masyarakat RW 5 Desa Pleret, dan bantuan sarana berupa timbangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
3	Sumber dana Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan	Triangulasi sumber dan triangulasi teknik	Sumber dana yang diperoleh Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan berasal dari perusahaan berupa bantuan bak sampah

Sumber: diolah peneliti, 2018

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survey atau angket. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuesioner atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian dibutuhkan untuk menggali data-data yang relevan sesuai dengan masalah dan jenis penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), analisis dokumentasi. Sedangkan alat yang digunakan dalam pengumpulan data berupa alat perekam, pedoman wawancara, kamera, buku catatan.

3.5.1 Observasi

Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data (Satori dan Komariah, 2014:105). Sedangkan untuk membantu observasi, Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan bahwa diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam.

Menurut Bandur (2016:105), terdapat dua jenis observasi yang signifikan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yakni observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi langsung (*direct observation*). Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi langsung sangat relevan untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian (Bandur, 2016:105).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung (*direct observation*). Peneliti hanya mengamati atau melihat langsung perilaku atau fenomena tersebut tanpa terlibat langsung ke dalam kehidupan partisipan. Alat perolehan data yang digunakan peneliti dalam observasi adalah kamera dan lembar observasi yang berisi daftar catatan yang ingin diamati dalam kegiatan penelitian.

Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian di bulan Maret-Mei 2018 yaitu observasi kegiatan di tempat bank sampah, observasi papan informasi terkait bank sampah.

3.5.2 Wawancara Mendalam (*Indepth Interviews*)

Metode penelitian data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indepth interviews*) dimana penggunaan *indepth interviews* sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. (Menurut Bandur, 2016:108)

Wawancara mendalam (*indepth interviews*) terdiri atas *unstructured interviews* dan *semi-structured interviews*. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan wawancara semistruktur (*semi-structured interviews*) dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk dijadikan sebagai panduan utama ketika melakukan wawancara. Pada awal wawancara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian melanjutkan diskusi yang lebih spesifik berdasarkan jawaban informan.

Alat bantu yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan wawancara dan hasil data yang diperoleh dari wawancara adalah draf wawancara,

buku catatan, alat perekam, dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Wawancara selama periode penelitian yaitu bulan Maret-Mei 2018 dilakukan dengan wawancara informan yang telah terpilih melalui teknik *purposive sampling*. Adapun informan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. tanggal 05 Maret 2018, wawancara dengan ibu Ardiani L selaku staf bagian umum Kelurahan Sumbersari Kecamatan Bangil;
- b. tanggal 06 Maret 2018, wawancara dengan bapak Agus Supriono selaku kepala Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek, wawancara dengan bapak M.Soleh selaku ketua LPM, dan wawancara dengan bapak Akhmad Sahri selaku bapak RT 03;
- c. tanggal 06 Maret 2018 dan tanggal 19 April 2018 wawancara dengan ibu Habibah selaku sekretaris bank sampah Kampung Limo Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek;
- d. tanggal 07 Maret 2018, wawancara dengan bapak Bambang EP selaku mantan Lurah Kiduldalem Kecamatan Bangil, ibu Nurul Qomariyah selaku ketua Gabas (Gabungan Bank Sampah);
- e. tanggal 07 Maret 2018 dan tanggal 17 Maret 2018, wawancara dengan ibu Maulida selaku sekretaris Bank Sampah BISS Kelurahan Kiduldalem, wawancara dengan masyarakat RW.6 Kelurahan Kiduldalem, dan wawancara dengan ibu Muawaroh selaku bendahara II Bank Sampah BISS Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil;
- f. tanggal 08 Maret 2018, wawancara dengan bapak Rijono selaku sekretaris Desa Pleret;
- g. tanggal 11 Maret 2018, wawancara dengan ibu Peny Sulistyoyo selaku direktur Bank Sampah Kampung Limo, wawancara dengan ibu Yasir selaku masyarakat RW.5 Desa Pleret;
- h. tanggal 12 Maret 2018, wawancara dengan bapak Sugeng Utomo selaku ketua Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan dan wawancara dengan bapak Agus Wijaya selaku wakil RT;

- i. tanggal 21 Maret 2018, wawancara dengan bapak Imam Pamuji selaku Lurah Jogosari Kecamatan Pandaan, wawancara dengan bapak Arif selaku sie pengambilan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan, wawancara dengan ibu Bia selaku masyarakat RT.3 Gang Rajawali, dan wawancara dengan bapak Fatoni selaku ketua Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan;
- j. tanggal 26 Maret 2018, wawancara dengan bapak Sari selaku staf pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
- k. tanggal 19 April 2018, wawancara dengan bapak Muhammad Soleh selaku pengepul dari Bank Sampah Kampung Limo.

3.5.3 Analisis Dokumen (*Record Review*)

Menurut Bandur (2016:109), analisis dokumen sering digunakan dalam studi-studi sejarah dan analisis wacana. Peneliti kualitatif diharapkan memiliki dokumen-dokumen tertulis untuk menelusuri masalah penelitian yang sedang diteliti. Adapun dokumen-dokumen yang umum dalam penelitian kualitatif yang dapat dijadikan instrumen penelitian ialah *diaries*, jurnal harian peneliti, surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil keputusan, logs, pengumuman, dokumen pemerintah (undang-undang dan peraturan pemerintah).

Sama halnya dengan Satori dan Komariah (2014:148-149) yang menjelaskan bahwa dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir.

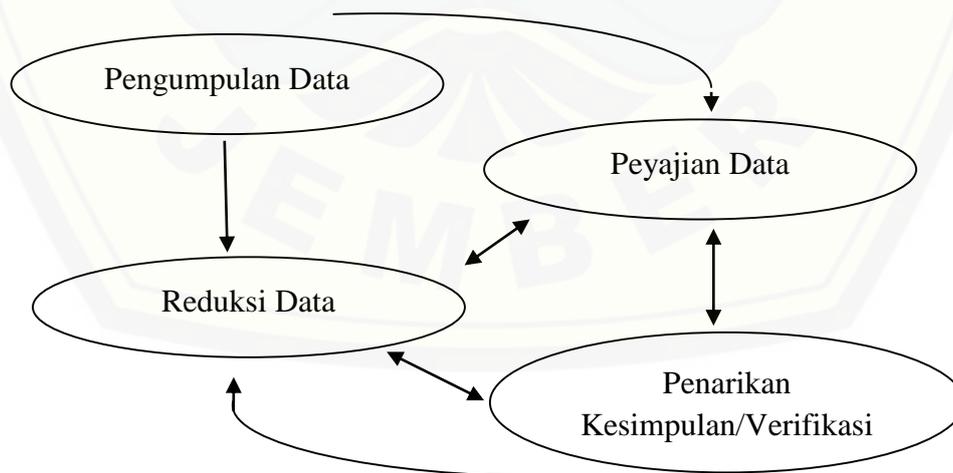
Peneliti berusaha memperoleh data yang berkaitan dengan pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan. Adapun beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yaitu:

- a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan perihal pembentukan bank sampah di setiap desa minimal 1 (satu);
- b. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan perihal tindak lanjut pembentukan bank sampah;

- c. Data bank sampah Kabupaten Pasuruan;
- d. Nota atau tanda terima bantuan sarana prasarana dari Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
- f. surat keputusan kepala desa tentang pembentukan Bank Sampah;
- g. Administrasi Bank Sampah seperti buku tabungan, laporan keuangan, nota penjualan sampah.

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif (*interactive model*) Miles and Huberman. Data dikumpulkan dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara dan catatan reflektif untuk memberikan gambaran, suasana, sikap, dan emosi dari responden, kemudian dilakukan editing. Data dikelompokkan dalam unit-unit kecil berupa kata, kalimat atau paragraf dan merangkum kembali dalam kategori-kategori tertentu. Gambaran model interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman, 1992

(Sumber: Idrus, 2009)

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan semua langkah-langkah analisis data dari Miles dan Huberman, diantaranya reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009:148) menjelaskan bahwa ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti jelaskan terkait proses analisis interaktif yang dilakukan dalam penelitian ini yang meliputi:

Adapun langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Satori dan Komariah (2014:218-220):

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data menurut Satori dan Komariah (2014:218) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari yang diperlukan. Pada langkah ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Data yang dikelompokkan yaitu data yang menjelaskan tentang proses terjadinya *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kiduldalem, Desa Pleret, dan Kelurahan Jogosari.

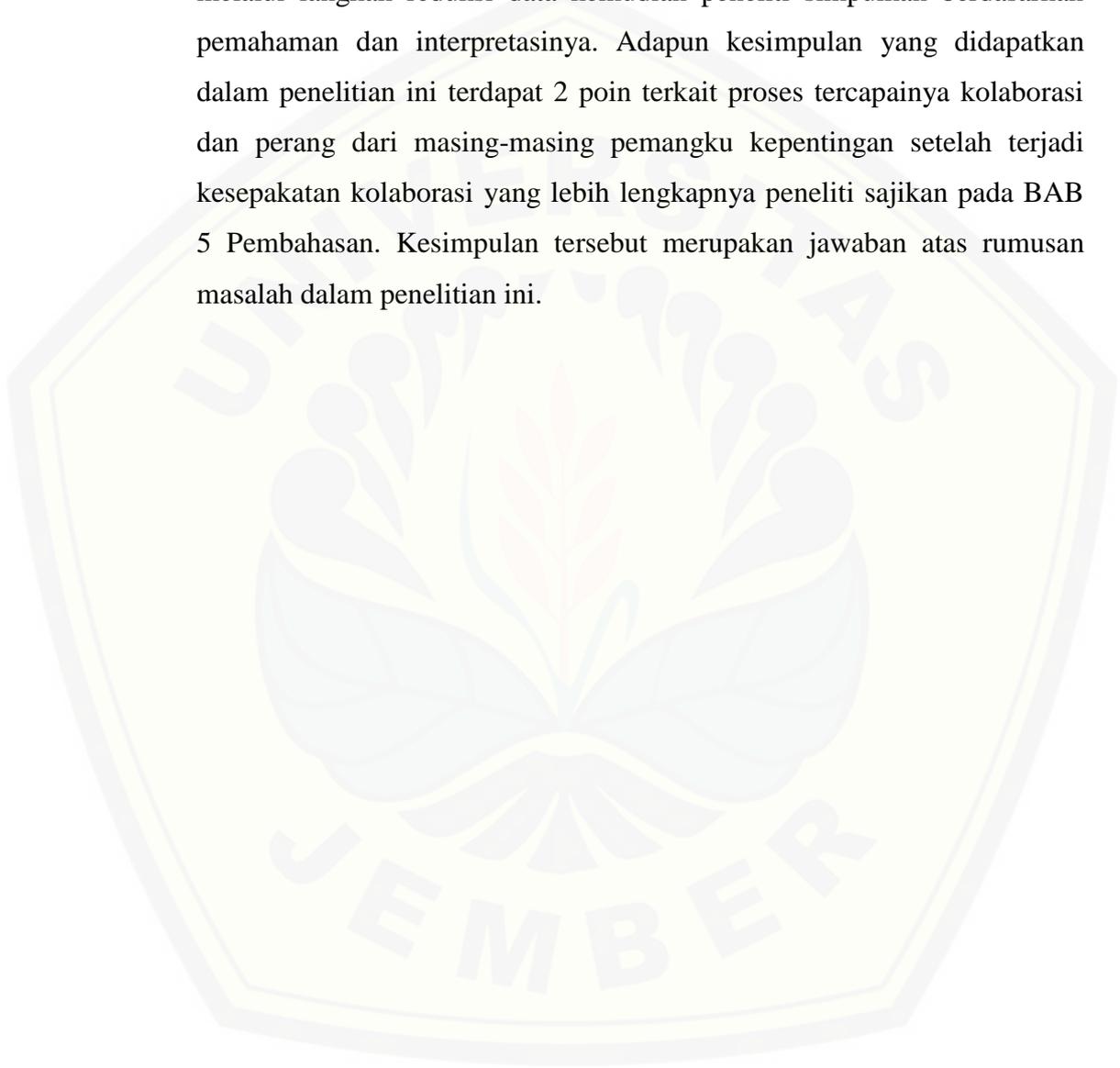
b. *Data Display* (Penyajian data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dari hasil penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif yang terletak pada BAB 4 Pembahasan. Dengan menyajikan data menggunakan teks naratif bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendekripsikan hasil penelitian.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Satori dan Komariah (2014:218) Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Data yang sudah dikumpulkan selama penelitian dan sudah melalui langkah reduksi data kemudian peneliti simpulkan berdasarkan pemahaman dan interpretasinya. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini terdapat 2 poin terkait proses tercapainya kolaborasi dan perang dari masing-masing pemangku kepentingan setelah terjadi kesepakatan kolaborasi yang lebih lengkapnya peneliti sajikan pada BAB 5 Pembahasan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan yang dilakukan di Bank Sampah BISS, Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan, dan Bank Sampah Kampung Limo, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Proses *collaborative governance* diawali dengan adanya proses penilaian atau identifikasi bahwa terdapat permasalahan lingkungan terkait sampah sehingga dibutuhkan solusi pemecahan masalah yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses inisiasi dengan melakukan musyawarah yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan deliberasi melalui musyawarah dan dialog untuk mencapai kesepakatan antarpemangku kepentingan untuk bekerja sama dan dilanjutkan dengan tahapan implementasi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan.
2. Peran pemangku kepentingan setelah terjadi kesepakatan kolaborasi dalam pengelolaan Bank Sampah BISS, Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan, dan Bank Sampah Kampung Limo sebagai berikut.
 - a. Kelompok Tim Penggerak PKK di RW 06 Kelurahan Kiduldalem dan RW 05 Desa Pleret dan pemuda di RT 03 RW 06 Gang Rajawali Kelurahan Jogosari berperan sebagai pengelola yang menjalankan operasional bank sampah.
 - b. Pemerintah Desa atau Kelurahan berperan sebagai pelindung dan fasilitator dalam pengelolaan bank sampah.
 - c. Tokoh masyarakat sebagai pendukung dalam kegiatan bank sampah dan ikut mengajak masyarakat agar terlibat dalam kegiatan bank sampah.

- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan bank sampah.
- e. Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pengurus bank sampah Rajawali Peduli Lingkungan secara teknis.
- f. Pengepul berperan sebagai tempat menyetorkan sampah yang dihasilkan dari nasabah untuk dijual.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bank sampah sebaiknya melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pengepul yang tetap bagi yang belum memiliki pengepul tetap sehingga sampah dapat tersetor secara rutin dan pasar untuk menjual hasil dari kerajinan daur ulang sehingga dapat meningkatkan hasil pendapatan masyarakat.
2. Perlu adanya keterlibatan secara intensif dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan bank sampah mengingat bahwa bank sampah merupakan salah satu alternatif yang dapat membantu mengatasi permasalahan lingkungan dan dengan adanya bank sampah dapat meminimalisir jumlah sampah yang masuk ke TPA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Handoko.
- Bandur, A. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metode, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Basriyanta. 2007. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Penerbit Kaisius.
- Creswell, John W. 2016. *Reserch Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denhardt, J. V. dan R. B. Denhardt. 2003. *The New Public Service*. New York: M.E. Sharpe. S. Pasaribu. 2013. *Pelayanan Publik Baru: dari Steering ke Serving*. Cetakan Pertama. Bantul: Kreasi Wacana
- Emerson, K. Dan T. Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance Regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kodoatie, R. J dan R. Syarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Moleong, L. J.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, D dan A. Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, R. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Raco, J.R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Robbins, S. P. Dan M. Coulter. 2010. *Manajemen Edisi Kespuluh*. Jakarta: penerbit Erlangga
- Saifuddin. 2014. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*.Yogyakarta: Deepublish.

- Satori, D. dan A. Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suaedi, F & Bintoro. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan e-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarto, H. S. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryati, Teti. 2009. *Bijak & Cerdas Mengolah Sampah: Membuat Kompos dari Sampah Rumah Tangga*. Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka.
- Purwendro, S & Nurhidayat. 2007. *Mengolah Sampah untuk Pupuk dan Pestisida Organik*. Depok: Penebar Swadaya.
- Utami, Eka. 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.
- Usman, H dan P. S. Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

JURNAL ILMIAH

- Ansell, C & Gash, A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18:543-571
- Damayanti, R. & Susilih, S. 2014. Efektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah (Studi tentang Bank Sampah di Kecamatan Sukmajaya, Depok). *FISIP UI*
- Emeron, K., Nabatchi, T., dan Balogh, S. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *of Public Administration Research and Theory*, 22:1-29
- Morse, R. S & Stephens, J. B. 2012. Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18(3), 565-584

Shentika, P. A. 2016. Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. *JESP*, Vol.8, No.1, 92-100

Sujiyanto. 2016. Analisis Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.5, No. 3, 115-122

LEMBAGA

Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2017*. Kabupaten Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan.

Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

PRODUK HUKUM

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah*. 3 Agustus 2015. Pasuruan

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2016. *Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah*. 26 Mei 2016. Pasuruan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010. *Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan*. 22 April 2010. Pasuruan

Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor 660/816/424.078/2015. *Pembentukan Bank Sampah*. 21 Mei 2015. Pasuruan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. *Pengelolaan Sampah*. 7 Mei 2008. Lembaga Negara Republik Inonesia Tahun 2008 Nomor. Jakarta

SKRIPSI

Harmawan, B. Y. *Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Hutagalung, N. A. B. 2014 *Collaborative Governance dalam Manajemen Promosi Pasriwisata Danau Toba Sumatera Utara*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Wahyudiantik, Y. 2013. *Collaborative Governance* Pengolahan Limbah Sapi (Studi: Kolaborasi *Stakeholders* dalam Pengolahan Limbah Sapi menjadi Biogas di Kabupaten Ngawi). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

ARTIKEL INTERNET

Arifin, M. 2016. Gedung Bank Sampah di Kabupaten Pasuruan Dibangun dari Dana Desa. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3225252/gedung-bank-sampah-di-kabupaten-pasuruan-dibangun-dari-dana-desa> [Diakses pada 3 Oktober 2018] pukul 22.15 WIB

Arifin, M. 2017. Kabupaten Pasuruan Pertahankan Piala Adipura untuk Kota Bangil. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3577566/kabupaten-pasuruan-pertahankan-piala-adipura-untuk-kota-bangil> [Diakses pada 30 September 2018].

Arifin, J. 2018. Belum Pasti Kapan TPA Wonokerto Dibangun. <https://radarbromo.co.id/2018/08/04/belum-pasti-kapan-tpa-wonokerto-dibangun/> [Diakses pada 4 Oktober 2018]

Laras. 2014. Pembuangan Sampah di Kenep Beji Ganggu Kesehatan. <http://www.laraspostonline.com/2014/12/pembuangan-sampah-di-kenep-beji-ganggu.html> [Diakses pada 1 Oktober 2018]

Munasya. 2016. Begini Cara Mengelola Bank Sampah. <http://munasya.com/%E2%80%8Bbegini-cara-mengelola-bank-sampah/> [Diakses pada 22 Januari 2018].

Prabowo. 2016. Yuk, Mengenal Lebih Dekat Bank Sampah ‘Kampoeng Limo’ Desa Pleret Pohjentrek. <https://tribunus-antara.com/2017/02/16/yuk-mengenal-lebih-dekat-bank-sampa.html> [Diakses pada 3 Oktober 2018].

Syairwan, I. 2018. Desa di Kabupaten Pasuruan Diimbau Ikut Kelola Sampah, Ini Tujuannya. <http://surabaya.tribunnews.com/2018/04/07/desa-di-kabupaten-pasuruan-diimbau-ikut-kelola-sampah-ini-tujuannya/> [Diakses pada 30 September 2018]

Yoenianto, A. 2016. Bupati Pasuruan Galakkan Program SDSB. <https://news.okezone.com/read/2016/04/15/519/1364097/bupati-pasuruan-galakkan-program-sdsb&hl=id-ID> [Diakses pada 30 September 2018]

_____. 2017. Ini dia 17 Desa di Kabupaten Pasuruan yang Meraih Penghargaan Bangkit Desaku Sinergi Jawa Pos. <http://www.radarmalang.id/ini-dia-17-desa-di-pasuruan-yang-meraih->

[penghargaan-bangkit-desaku-sinergi-jawa-pos/](#) [Diakses pada 3 Oktober 2018]

<https://kbbi.web.id/kelola> [Diakses pada 5 Oktober 2018]



Lampiran 6.1 Surat ijin penelitian dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Jember



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 880/UN25.3.1/LT/2018
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

28 Februari 2018

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan
Di
Pasuruan

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 749/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Siti Jahro
NIM : 140910201051
Fakultas : ISIP
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Bangka I No.15 Sumbersari-Jember
Judul Penelitian : "*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kabupaten Pasuruan"
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan
2. Desa Pleret, Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan
3. Kelurahan Pandaan, Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
4. Kelurahan Kiduldalem, Kec. Bangil Kab. Pasuruan
5. Desa Tejawangi, Kec. Purwosari Kab. Pasuruan
6. Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kab. Pasuruan
Lama Penelitian : 3 Bulan (2 Maret-30 Juni 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


Dr. Susanto, M.Pd.
196306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan;
2. Kepala Desa Fieret, Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan;
3. Lurah Pandaan, Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
4. Lurah Kiduldalem, Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
5. Kepala Desa Tejawangi, Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
6. Ketua FKPL Kab. Pasuruan;
7. Dekan FISIP Univ Jember;
8. Mahasiswa ybs;
9. Arsip


CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran 6.2 Surat rekomendasi dari Bakesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Panglima Sudirman No. 54 Telp. (0343) 424162 Fax. (0343)411553
 Email : bakesbangpol@pasuruankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY
 NO. 072 / 671 /424.104/SUR/RES/2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Dalam negeri (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168),

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Menimbang : Surat dari Universitas Jember, tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor : 880/UN25.3.3.1/LT/2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama SITI JAHRO

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : SITI JAHRO
 NIM : 140910201051
 Alamat : Lirboyo Rejosolor RT 002 RW 002 Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
 Instansi/Organisasi : Universitas Jember
 Kebangsaan : Indonesia

Judul Penelitian : **" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KABUPATEN PASURUAN"**

Tujuan : Penelitian
Bidang Penelitian : Lingkungan Hidup
penanggung Jawab : SITI JAHRO
Anggota/Peserta : 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -

Waktu Penelitian : 3 (tiga) Bulan TMT Surat dikeluarkan
Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup, Desa Pleret, Tejawangi, Kelurahan Pandaan, Kiduldalem Kabupaten Pasuruan

1. Berkeajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan,
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Berkeajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenaknya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama

Pasuruan, 5 Maret 2018
 An Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Pasuruan
 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa


FAUZAN, S Pd, MM
 Pembina
 NIP. 196706151986021001

TEMBUSAN :
 Yth.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
2. Sdr. Camat Pandaan, Bangil, Pohjentrek dan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
3. Sdr. Lurah Kiduldalem dan Pandaan Kab. Pasuruan
4. Kepala Desa Pleret dan Tejawangi Kabupaten Pasuruan
5. Arsip
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0

Lampiran 6.3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pemangku Kepentingan

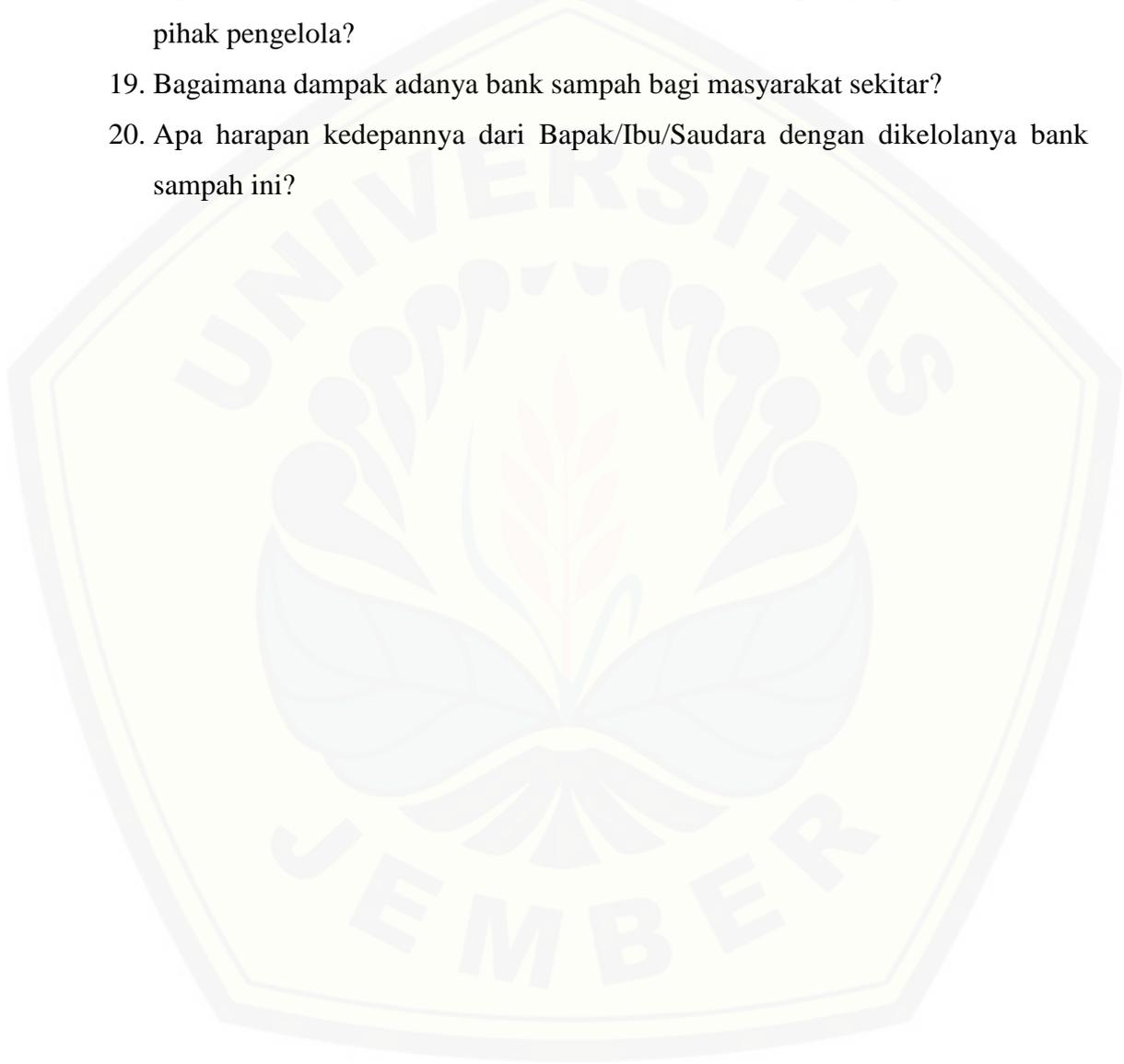
1. *Assessment* (penilaian)
 - a. Apakah kolaborasi diperlukan dalam pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Pasuruan?
 - b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah?
 - c. Siapa pemangku kepentingan yang menjadi pemeran kunci dalam kolaborasi ini?
2. *Inisiation* (inisiasi/permulaan)
 - a. Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kolaborasi pada proses pengelolaan bank sampah?
 - b. Bagaimana melibatkan setiap pemangku kepentingan yang tergabung dalam struktur untuk ikut serta dalam proses kolaborasi?
 - c. Apakah terdapat SOP yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan proses kolaborasi?
3. *Deliberation* (Pertimbangan/Musyawarah)
 - a. Apakah terdapat aturan dasar yang dibentuk bersama dalam menjalankan proses kolaborasi pada pengelolaan bank sampah?
 - b. Apakah terdapat musyawarah dan dialog yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi?
 - c. Apakah terdapat kesepakatan kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan tentang pengelolaan bank sampah?
4. *Impelementation* (Implementasi)
 - a. Apakah terdapat pembagian tugas antar pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan bank sampah?
 - b. Apakah terdapat proses evaluasi hasil yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terhadap hasil dari pengelolaan bank sampah di kabupaten pasuruan?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap pembentukan Bank Sampah?
2. Siapa yang hadir dalam musyawarah rencana pembentukan bank sampah tersebut?
3. Apakah semua masyarakat hadir/perwakilan atau hanya tokoh masyarakat desa?
4. Apakah ada kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan saat kegiatan perencanaan pembentukan bank sampah?
5. Bagaimana jika ada tanggapan, saran atau masukan dari masyarakat?
6. Siapa yang mengambil keputusan dalam musyawarah pembentukan bank sampah?
7. Apakah seluruh masyarakat setuju dengan keputusan yang di ambil?
8. Siapa yang mengelola bank sampah tersebut? Apakah Bapak/Ibu/saudara ikut berpartisipasi dalam pengelolaan? Apa bentuk partisipasinya?
9. Bagaimana proses pembentukan organisasi pengelola bank sampah?
10. Apakah seluruh pengurus organisasi adalah masyarakat Desa asli?
11. Bagaimana pihak pengelola mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan bank sampah?
12. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan bank sampah?
13. Apakah masyarakat terlibat untuk mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan?
14. Jika ada, bagaimana berlangsungnya kegiatan pertemuan tersebut? Apa menyediakan ruang publik untuk menyampaikan pendapat atau sekedar laporan kegiatan?
15. Apakah Bapak/Ibu/saudara pernah memberikan kritik dan saran kepada pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan bank sampah?

16. Bagaimana pengaruh pengembangan bank sampah terhadap kehidupan masyarakat? khususnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
17. Apakah bapak/Ibu/Saudara mendapatkan manfaat dengan dibentuknya bank sampah, atau merasa di rugikan? Mohon dijelaskan?
18. Apakah sudah maksimal dalam pengelolaan bank sampah yang dilakukan oleh pihak pengelola?
19. Bagaimana dampak adanya bank sampah bagi masyarakat sekitar?
20. Apa harapan kedepannya dari Bapak/Ibu/Saudara dengan dikelolanya bank sampah ini?



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pengepul

1. Bagaimana awal mula kerja sama dengan bank sampah tersebut?
2. Sejak kapan pengepul terlibat dalam bank sampah tersebut?
3. Apa peran dari pengepul dalam pengelolaan bank sampah?
4. Bagaimana pembagian tugas dalam kegiatan bank sampah?
5. Apakah ada kerjasama antara pengepul dengan masyarakat dan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana?
6. Keuntungan apa sajakah yang diperoleh pengepul dengan adanya bank sampah?
7. Apakah ada bentuk evaluasi atau pengendalian yang dilakukan oleh pengepul terhadap proses pengelolaan bank sampah? Jika ada, bagaimana bentuknya?
8. Sejauh ini apa saja hambatan yang ditemui atau dirasakan oleh pengepul dalam mengelola dan mengembangkan bank sampah?
9. Adakah kesepakatan tertulis antara pengepul dengan pemerintah desa dan pengelola bank sampah terkait kerja sama ini?
10. Kesepakatan apa saja yang telah dicapai dengan pihak bank sampah? (misalnya terkait harga, jenis sampah, perubahan harga).

Lampiran 6.4 Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

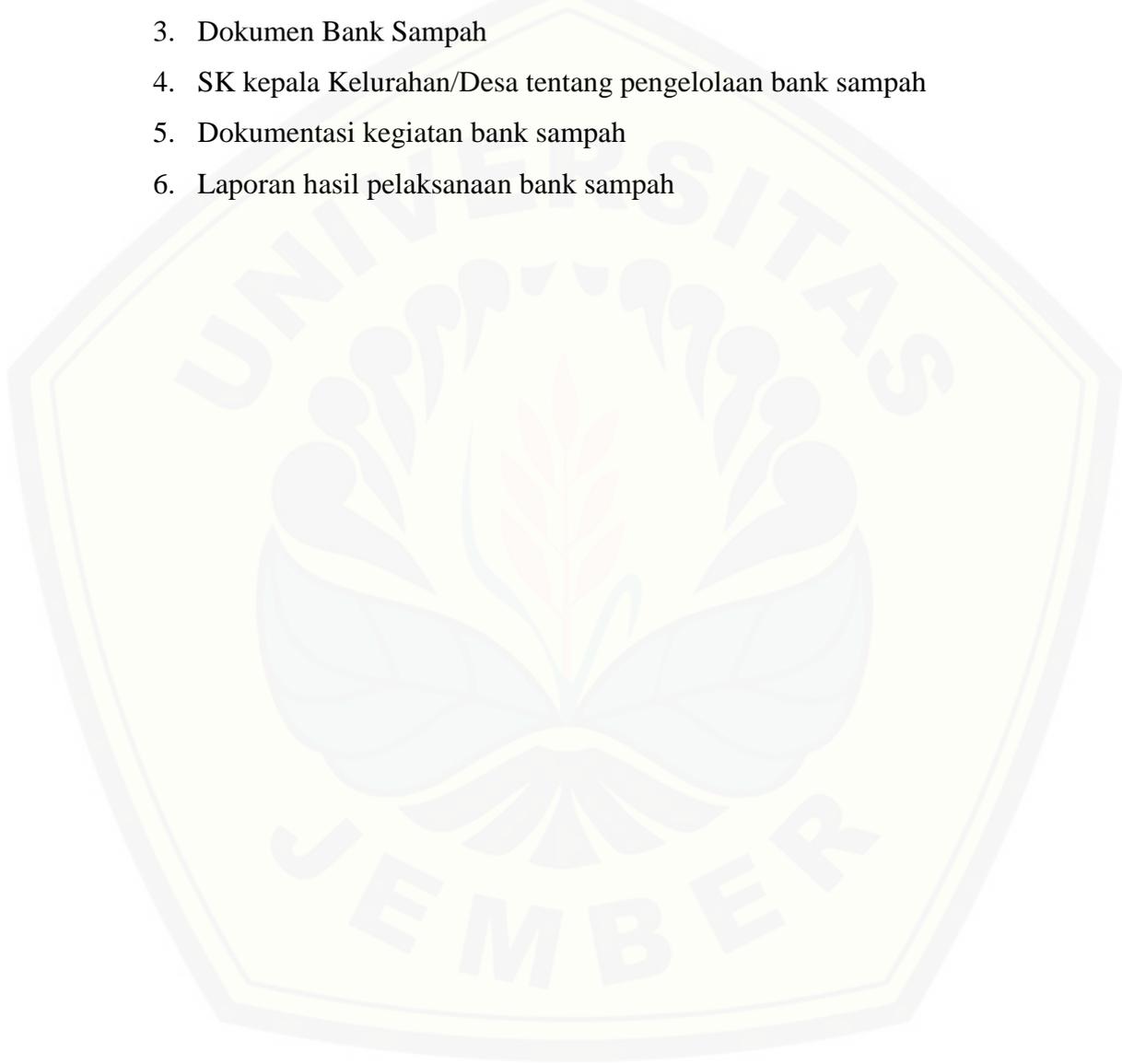
1. Kegiatan bank sampah
2. Situasi sosial di lingkungan bank sampah



Lampiran 6.5 Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Dokumen peraturan undang-undang
2. Profil Kelurahan Kiduldalem, Desa Pleret, dan Kelurahan Jogosari
3. Dokumen Bank Sampah
4. SK kepala Kelurahan/Desa tentang pengelolaan bank sampah
5. Dokumentasi kegiatan bank sampah
6. Laporan hasil pelaksanaan bank sampah



Lampiran 6.6 Dokumentasi foto penelitian

Hasil foto dokumentasi penelitian



Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Pasuruan



Wawancara bapak Sari Haryadi selaku staf pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan



Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Surat edaran pembentukan bank sampah

		PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (B L H) Jl. Patimura No 223 Telp./ Fax. (0343) 425279 PASURUAN Kode Pos 67121
		Pasuruan, Mei 2015
Nomor	: 660/ / 424.078/2015	Kepada :
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Camat
Lampiran	: 1 (satu) berkas	di-
Perihal	: Pembentukan Bank Sampah	<u>PASURUAN</u>

Sehubungan dengan isu nasional mengenai permasalahan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), yang memuat tentang :

1. Makin besarnya timbulan sampah.
2. Rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan.
3. Keterbatasan lahan TPA.
4. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle).

dan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang persampahan antara lain :

1. Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3 R melalui Bank Sampah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan.

Maka dihimbau kepada para Camat untuk segera **membentuk bank sampah minimal 1 (satu) unit bank sampah** di tiap desa/kelurahan di wilayah kerja Saudara masing-masing. Adapun tentang Nama Bank Sampah, Pengurus, Lokasi dan Jumlah nasabah diharapkan untuk dapat disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan paling lambat **akhir Juni 2015**.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

TEMBUSAN : Bapak Bupati Pasuruan sebagai laporan	<u>Ir. MUCHAIMIN, MT</u> Pembina Tingkat I NIP.19590730 198601 1 001
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
(BLH)

Jl. Patimura No 223 Telp / Fax (0343) 425279
PASURUAN
Kode Pos 67121

Pasuruan, Januari 2016

Nomor : 660/ / 424.078/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut
Pembentukan Bank Sampah

Kepada :
Yth. Sdr. Camat
di-
.....

Menindaklanjuti surat kami tanggal 21 Mei 2015 nomor 660/816/424.078/2015 perihal pembentukan Bank Sampah di setiap desa minimal (1) satu Bank Sampah dan tanggal 30 Oktober 2015 nomor 660/1589/424.078/2015 perihal tindak lanjut pembentukan bank sampah maka dengan ini dimohon Saudara agar melaporkan data hasil bentukan Bank Sampah kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, adapun data yang dilaporkan adalah :

1. SK Bank Sampah dari Kepala Desa/Kelurahan
2. Nama Bank Sampah
3. Pengurus
4. Lokasi
5. Jumlah nasabah
6. Jumlah sampah yang ditangani Bank Sampah tahun 2015
7. Omset per bulan pada tahun 2015

Perlu kami sampaikan bahwa data dimaksud paling lambat diterima akhir Januari 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

TEMBUSAN :
Yth. Bapak Bupati Pasuruan
sebagai laporan

Ir. MUCHAIMIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19590730 198601 1 001

DATA BANK SAMPAH YANG TELAH DILAPORKAN

NO	KECAMATAN	BANK SAMPAH	SUDAH	BELUM
1	BANGIL	11	√	
2	BEJI			√
3	GEMPOL	1	√	
4	GONDANGWETAN	1	√	
5	GRATI			√
6	KEJAYAN			√
7	KRATON			√
8	LEKOK			√
9	LUMBANG			√
10	NGULING			√
11	PANDAAN	2	√	
12	PASREPAN			√
13	POHJENTREK			√
14	PRIGEN			√
15	PURWODADI			√
16	PURWOSARI	1	√	
17	PUSPO			√
18	REJOSO			√
19	REMBANG			√
20	SUKOREJO	2	√	
21	TOSARI			√
22	TUTUR			√
23	WINONGAN	2	√	
24	WONOREJO			√

DATA BANK SAMPAH KABUPATEN PASURUAN

No	Nama Bank Sampah	Lokasi	No SK	Tanggal Penetapan
1	Dadi Mulyo	Pandean Utara RW 04 Kel. Kikhaldalem - Bangil	No. 04 Tahun 2012	11 Maret 2012
2	Berkah Sejahtera	Pasar Baru RW 05 Kel. Kikhaldalem - Bangil	No. 05 Tahun 2012	01 Desember 2012
3	Lenggeng Abadi	Ledok Selatan RT 01 RW 07 Kel. Kikhaldalem - Bangil	No. 05 Tahun 2012	02 Desember 2012
4	Wanjati	Des. Jantaran Ds. Karangjati	No. 02 tahun 2014	05 Januari 2013
5	Bank Semud	Ling. RT 02 dan RT 04 - RW 07 Ledok Selatan Kel. Kikhaldalem - Bangil	No. 02 tahun 2013	11 Januari 2013
6	Karya Asri	Ling. RT 02 dan RT 04 - RW 07 Ledok Selatan Kel. Kikhaldalem - Bangil	No. 03 Tahun 2013	11 Januari 2013
7	OPEK	Des. Kemuning Ds. Sumberuko - Gempol	No. 240107424.212.2002/2015	12 Februari 2013
8	BHSS	Lingkungan RW 06 Ledok Utara Kel. Kulat Dalam - Bangil	No. 05 Tahun 2013	22 Februari 2013
9	Panggung Jaya	Pandean Utara RW 04 Kel. Kikhaldalem - Bangil	No. 05 Tahun 2013	11 Maret 2013
10	Dahlis	RW 02 Kel. Kikhaldalem - Bangil	No. 05 Tahun 2013	11 Maret 2013
11	Berkah Sejahtera II	RW 05 Kel. Kikhaldalem - Bangil	No. 06 Tahun 2013	11 Maret 2013
12	Barokah	Kecamatan RW 03 Kel. Kikhaldalem - Bangil	No. 02 Tahun 2014	17 Maret 2013
13	Ulanosis	Des. Glatic Timur Ds. Glaguhan	No. Reg. 14018424.209.2003/2014	05 Juni 2013
14	FPI Bina	Perum. Taman Permata Indah RW 04 Kel. Pajale	No. 01 Tahun 2013	06 Juni 2013
15	Kampung Lamo	RW 05 Desa Pleret Kec. Pohjonek	No. 14175424.217.03/2014	03 April 2014
16	Kris (Kelompok Ibu Suka Sampah)	Ling. Genengaji Gg. 5 RT 03 RW 11 Kel. Peabidian Kec. Prigen	No. 004 Tahun 2014	29 Juli 2014
17	Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Tersebut	KI 08 RW 02 Kel. Kasuman - Bangil	No. 03 Tahun 2014	11 Agustus 2014
18	Lejorangan	Ling. Desa Lejorangan	No. 1423424.08.2003.NIL/2014	22 Desember 2014
19	Tunas Andana	Ling. RT 01 dan RT 02 di RW 01 Ds. Kersikan	No. 09 Tahun 2015	04 Januari 2015
20	Lingkar Pandan	Kelurahan Pandan	No. 05 Tahun 2015	21 April 2015
21	Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Bersih RT 13 RW 03	Kelurahan Kasuman - Bangil	No. 05 Tahun 2015	20 Mei 2015
22	As Sholehah	MA. As Sholehah Jl. Raya Warungdowo No. 22 Kab. Pasuruan	Belum ada SK	11 Juni 2015
23	Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Bersih KI 01 RW 01	Kelurahan Kasuman - Bangil	No. 06 Tahun 2015	02 Desember 2015
24	UPAS	RT 03 dan RT 04 Ds. Bersih Ds. Witangan Lor	Belum ada SK	
25	CREATIVE	RT. 03 RW 01 Des. Bantaran Kiri Ds. Breduran	Belum ada SK	
26	Dinuk Sejahtera	Des. Dinuk RT 01 RW 05 Ds. Candirezes - Frejeng	Belum ada SK	
27	Dahlis	Larangan Perum Permata Asri RW 05	No. 10 Tahun 2014	07 Desember 2014
28	Berkah	Kalirejo	Belum ada SK	
29	Ketagan Bersih	Desa Ketagan Kec. Rejoso	No. 66018424.212.2003/2011	2 Mei 2017
30	Lentera	Ling. Desa Toyaming Kec. Rejoso	No. 1418424.05.14.04/2017	19 Mei 2017
31	Mahmur Bersana	Ling. Desa Sumburjo Kec. Rejoso	No. 1417103.424.223.2.10/2017	19 Mei 2017
32	Wisma Makhluk	Ling. Desa Kawarjo Kec. Rejoso	No. 66071424.223.02.06/2017	29 Mei 2017
33	AnakSung	Des. Ngipik, Desa Sumberuko - Kec. Gempol	Belum ada SK	
34	Rajawali Peduli Lingkungan	RT 02 RW 06 Gang Rajawali Kel. Jagesari Kec. Pandean	No. 521/03/424.311.1.01/2017	7 Februari 2017
35	MeLati	RT 005 RW 001 Beluruban Latek	No. 400/01/424.214.1.09/2016	
36	Acharya Sumberuko	Des. Bumbungan RT 003 RW 009 Desa Sumberuko	No. 530/07/424.212.2002/2016	20 Januari 2017
37	Bumi Bersih	Des. Ngadiono Desa Sumberuko Kec. Gempol	Belum ada SK	
38	Bank Sampah Kelurahan Dermu	Kelurahan Dermu Kec. Bangil	No. 148/01/424.301.1.01/2018	02 Desember 2017
39	Bank Sampah Wonosari	Desa Wonosari Kecamatan Gempol	Sudah ada SK	
40	Bank Sampah Bersih Gemuyah	Desa Wonokoyo Kecamatan Beji	No. 800/056/424.13.2.07/2016	15-Jan-16
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

Berita acara dan tanda terima bantuan sarana prasarana


PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
(B L H)
 JALAN PATIMURA No. 223 Telp. (0343) 425279 PASURUAN - 67121

BERITA ACARA PEMAKAIAN
BANGUNAN TPST
 NOMOR : 028/485 /424.078/2014

Pada hari ini Rabu Tanggal Duapuluh , Bulan Agustus, Tahun Dua ribu Empat belas,
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A N I P PANGKAT/GOLONGAN JABATAN	: Drs. H. ABDUL MUNIF AR, SH,MPd. : 19630607 198303 1 007 : Pembina Utama Muda : Kepala Badan Lingkungan Hidup Sebagai PIHAK KESATU
N A M A N I P PANGKAT / GOL JABATAN INSTANSI	: BAMBANG EKOPRIYANTO : 19621208 198703 1 012 : Penata , III/c : Kepala Kelurahan Kidul Dalem : Kantor Kelurahan Kidul Dalem Sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan pemakaian Kepada **PIHAK KEDUA**, Barang Inventaris Daerah berupa **Tanah dan Bangunan Pembuangan Sampah Transit (TPST)** , senilai **Rp.79.363.000,- (Tujuh puluh Sembilan Juta Tigaratus Enampuluh Tiga Ribu Rupiah)** guna mendukung kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. Sumber Dana APBD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2009, Selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA PEMAKAI  BAMBANG EKOPRIYANTO Penata NIP. 19621208 198703 1 012	PIHAK KESATU KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN  Drs. H. ABDUL MUNIF AR, SH,MPd. Pembina Utama Muda NIP. 19630607 198303 1 007
---	--

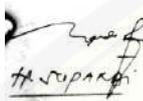
**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Raya Raci Km.09 Bangi - Pasuruan
Telp. (0343) 5616453 Fax. (0343) 5616453
E-mail: dlh.kabpasuruan@yahoo.co.id

Dusun Sukorejo, Desa Karang jati, Kecamatan Pandan.

TANDA TERIMA

Telah diterima barang sebagai berikut:

NO	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Ex - Banner Baku Campah	1	
2	Ex - Banner TK 2K	1	

Yang Menerima:  H. Supardi

Pasuruan,  Sri Haryadi

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Raya Raci Km.09 Bangi - Pasuruan
Telp. (0343) 5616453 Fax. (0343) 5616453
E-mail: dlh.kabpasuruan@yahoo.co.id

TANDA TERIMA

Telah diterima barang sebagai berikut:

NO	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Korangan Taka Dud	15	
2.	EMU	1	

Yang Menerima:  D. R. W. 04

Pasuruan,  D. R. W. 04

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Raya Raci Km.09 Bangi - Pasuruan
Telp. (0343) 5616453 Fax. (0343) 5616453
E-mail: dlh.kabpasuruan@yahoo.co.id

TANDA TERIMA

Telah diterima barang sebagai berikut:

NO	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Buku Tabungan Baku Campah	20	
2	Buku Register Baku Campah	20	
3	Buku Besar Baku Campah	20	

Yang Menerima:  A. S. H. 11

Pasuruan, 17 Oktober 2011
Yang Menyerahkan:  B. H. 11

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Raya Raci Km.09 Bangi - Pasuruan
Telp. (0343) 5616453 Fax. (0343) 5616453
E-mail: dlh.kabpasuruan@yahoo.co.id

TANDA TERIMA

Telah diterima barang sebagai berikut:

NO	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Ex Banner Baku Campah	1	
2	Ex Banner TK 2K	1	

Yang Menerima:  M. Rahmat

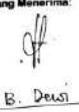
Pasuruan, 28 Agustus 2011
Yang Menyerahkan:  P. 2011

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Raya Raci Km.09 Bangi - Pasuruan
Telp. (0343) 5616453 Fax. (0343) 5616453
E-mail: dlh.kabpasuruan@yahoo.co.id

TANDA TERIMA

Telah diterima barang sebagai berikut:

NO	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Ex Banner Baku Campah	1	
2	Korangan	1	

Yang Menerima:  B. Dewi

Pasuruan,  B. H. 11

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Raya Raci Km.09 Bangi - Pasuruan
Telp. (0343) 5616453 Fax. (0343) 5616453
E-mail: dlh.kabpasuruan@yahoo.co.id

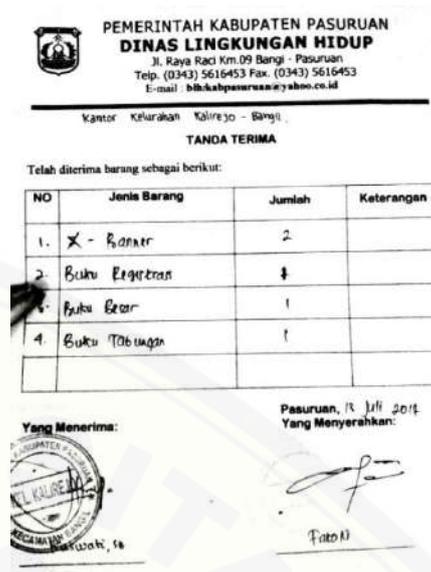
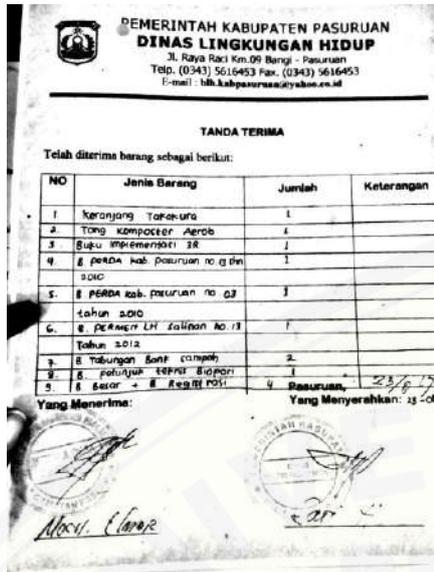
TANDA TERIMA

Telah diterima barang sebagai berikut:

NO	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Ex banner Baku Campah	1	
2.	Buku Besar Baku Campah	1	
3.	Buku Register Baku Campah	1	
4.	Buku Tabungan Baku Campah	1	

Yang Menerima:  R. Andriani

Pasuruan,  T. 2011



Tanda terima bantuan dari DLH untuk bank sampah di Kabupaten Pasuruan



Contoh Buku Besar dan Buku Tabungan Sampah

Hasil foto dokumentasi penelitian



Penelitian di Bank Sampah BISS, Kelurahan Kiduldalem,
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasurua



Wawancara ibu Ardiani staf Kelurahan Kiduldalem



Wawancara bapak Bambang Kepala Kelurahan Kiduldalem 2011-2017



Wawancara ibu Nurul Qomariyah ketua Gabas (gabungan sampah) bersinar Kiduldalem



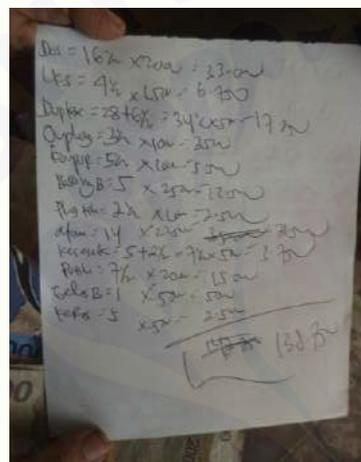
Wawancara masyarakat RW.6 Kelurahan Kiduldalem



Wawancara pengurus bank sampah BISS



Penjualan sampah ke pengepul

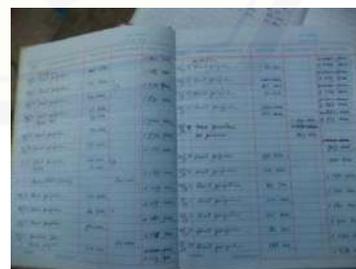
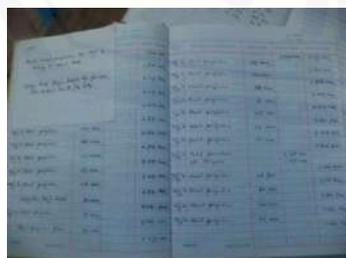
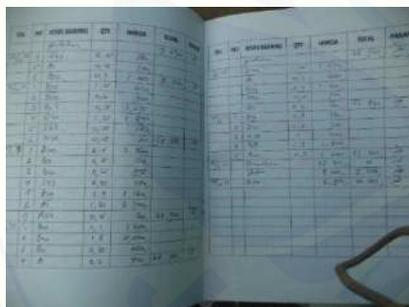
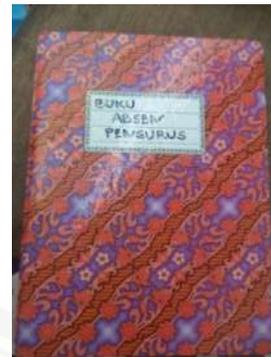


Tata Tertib Bank Sampah BISS

Nota penjualan sampah

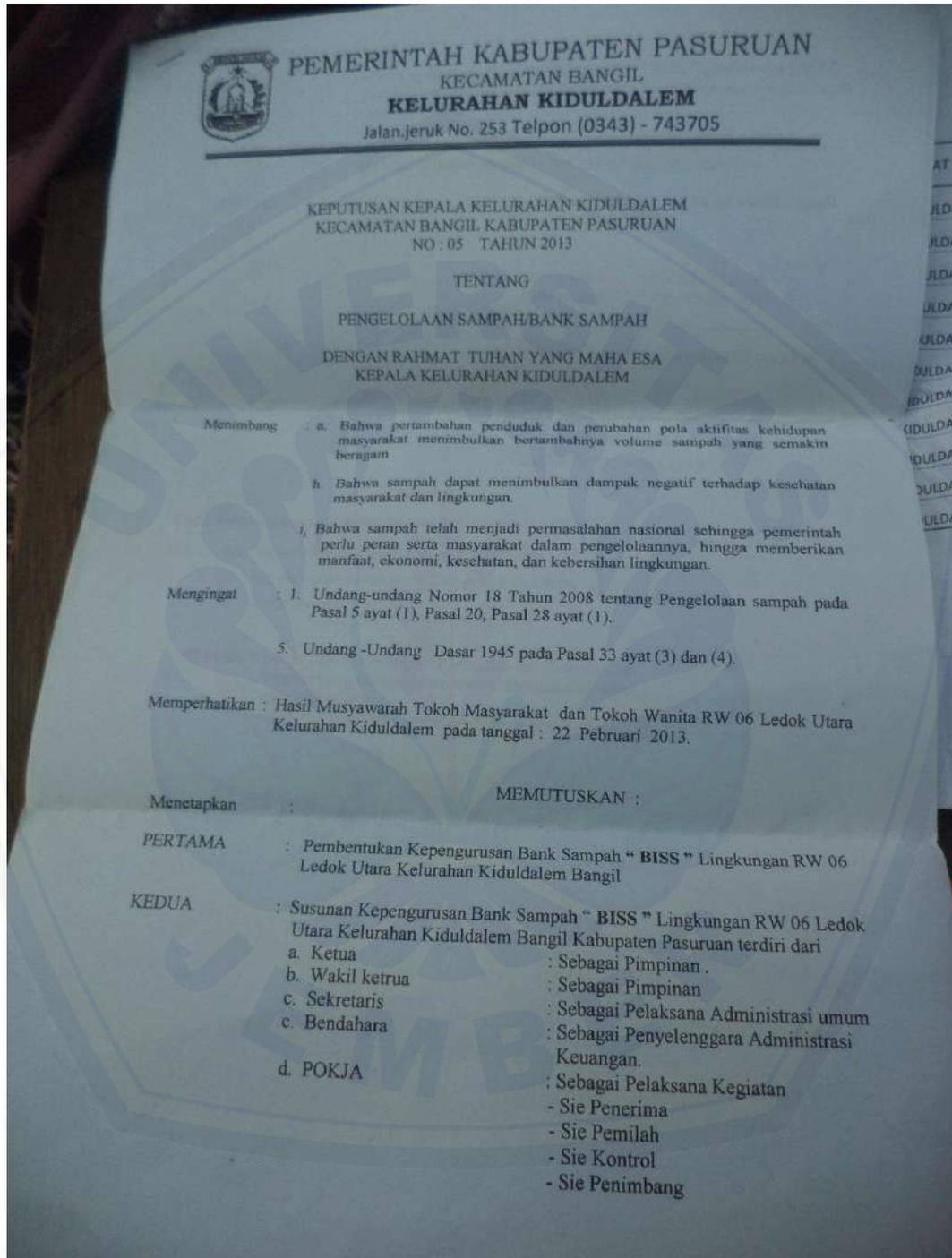


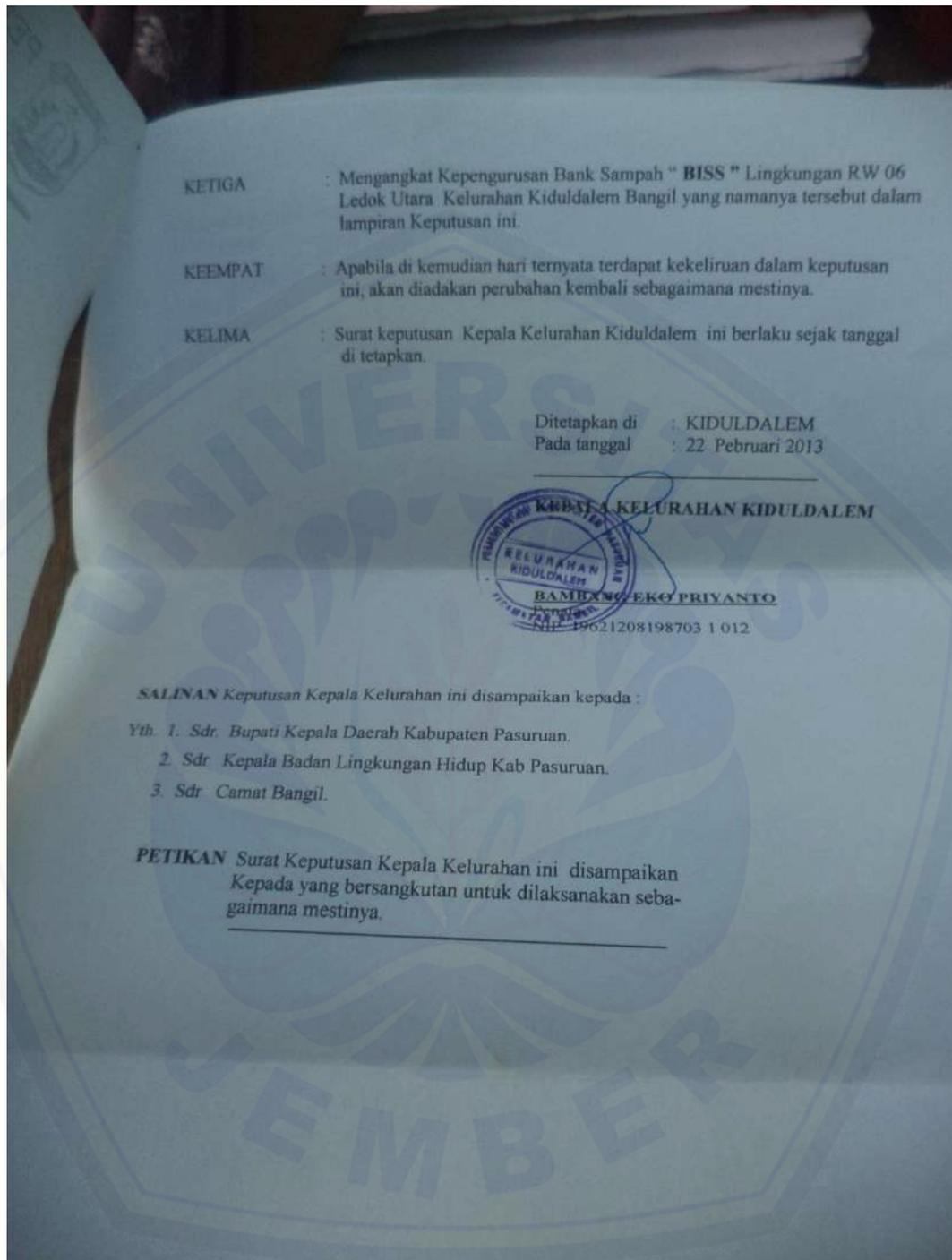
Hasil daur ulang bank sampah BISS



Pembukuan Bank Sampah BISS

Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kiduldalem tentang Pengelolaan Sampah/Bank Sampah





SAMPARAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KIDULDALEM NO 5 TH 2012
TENTANG PENGURUS BANK SAMPAH " BISS "

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	RI IFANI	PENANGGUNG JAWAB	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
2	NAMING ARYUNI	KETUA	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
3	MALULIDA RAHMAWATI	SEKRETARIS	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
4	DEWI ASYAH	KOORDINATOR	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
5	TATIK FARIDA	BENDAHARA I	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
6	MUAWAROH	BENDAHARA II	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
7	YANA SUSANTI	BAG. EVALUASI	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
8	NASITA	BAG. EVALUASI	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
9	TUTUT	BAG. QUALITY CONTROL	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
10	CHOKRUL BARIYAH	BAG. QUALITY CONTROL	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	
11	THOYIBAH	BAG. FINISHING / PENGEPAKAN	RW 06 LEDOK UTARA KIDULDALEM	

Hasil foto dokumentasi penelitian



Penelitian di Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan,
Kelurahan Jogosari, Kabupaten Pasuruan



Wawancara bapak Imam Pamuji Kepala Kelurahan Jogosari



Wawancara dengan wakil RT



Wawancara pengurus bank sampah Rajawali Peduli Lingkungan



Wawancara bapak Fatoni ketua FKPL Kabupaten Pasuruan



Wawancara masyarakat gang Rajawali



Gudang Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan



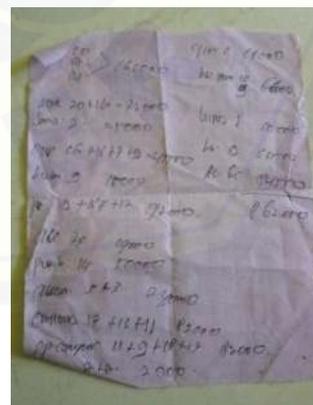
Sekretariat Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan



Kegiatan bank sampah Rajawali Peduli Lingkungan

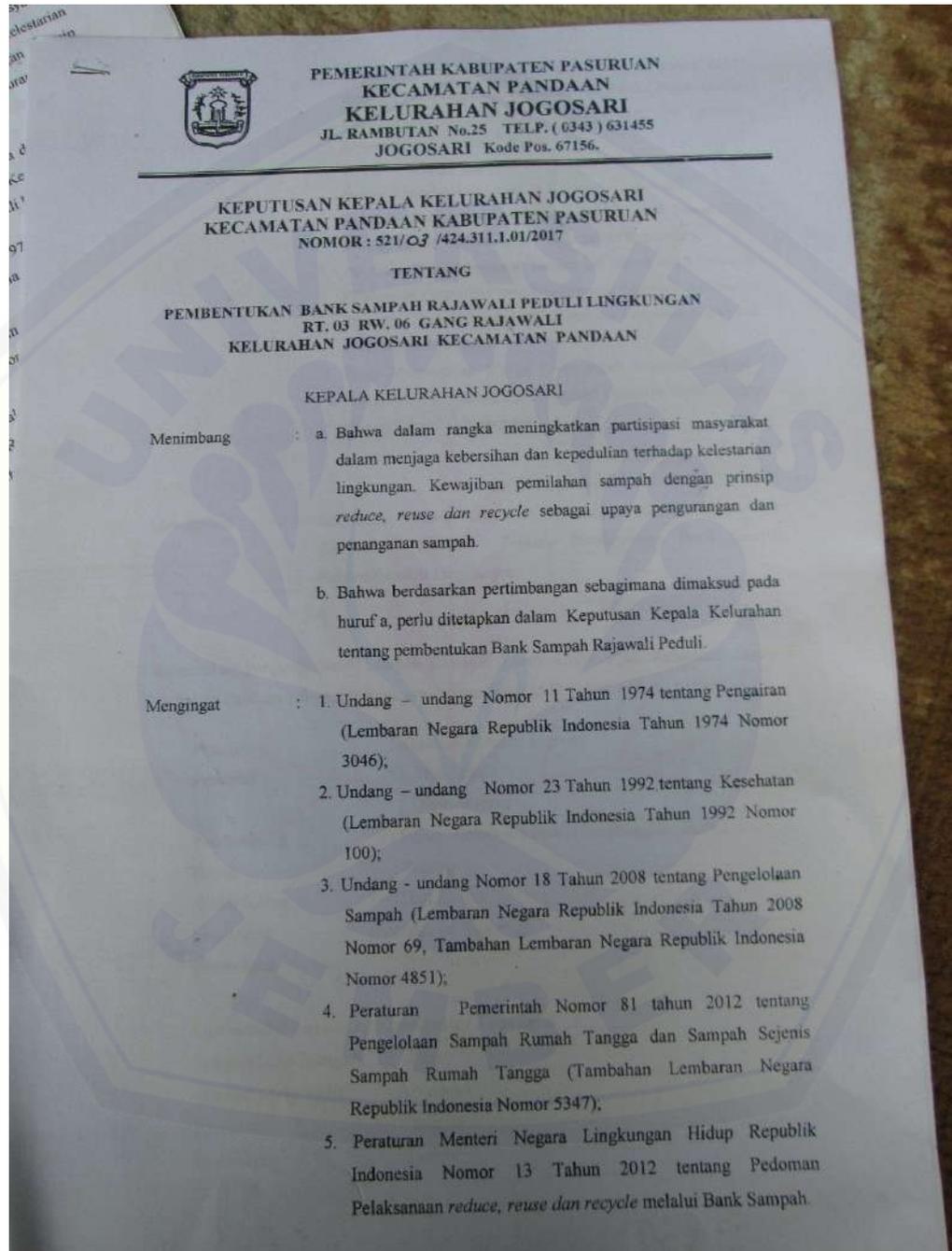


Buku Tabungan dari kertas bekas dan dari DL



Lingkungan Rajawali setelah ada bank sampah Nota hasil penjualan sampah

Surat Keputusan Kepala Kelurahan Jogosari tentang Pembentukan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan



6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
10. Hasil Musyawarah Warga Lingkungan Rajawali tanggal 7 Februari 2017 tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tentang Pembentukan Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan.

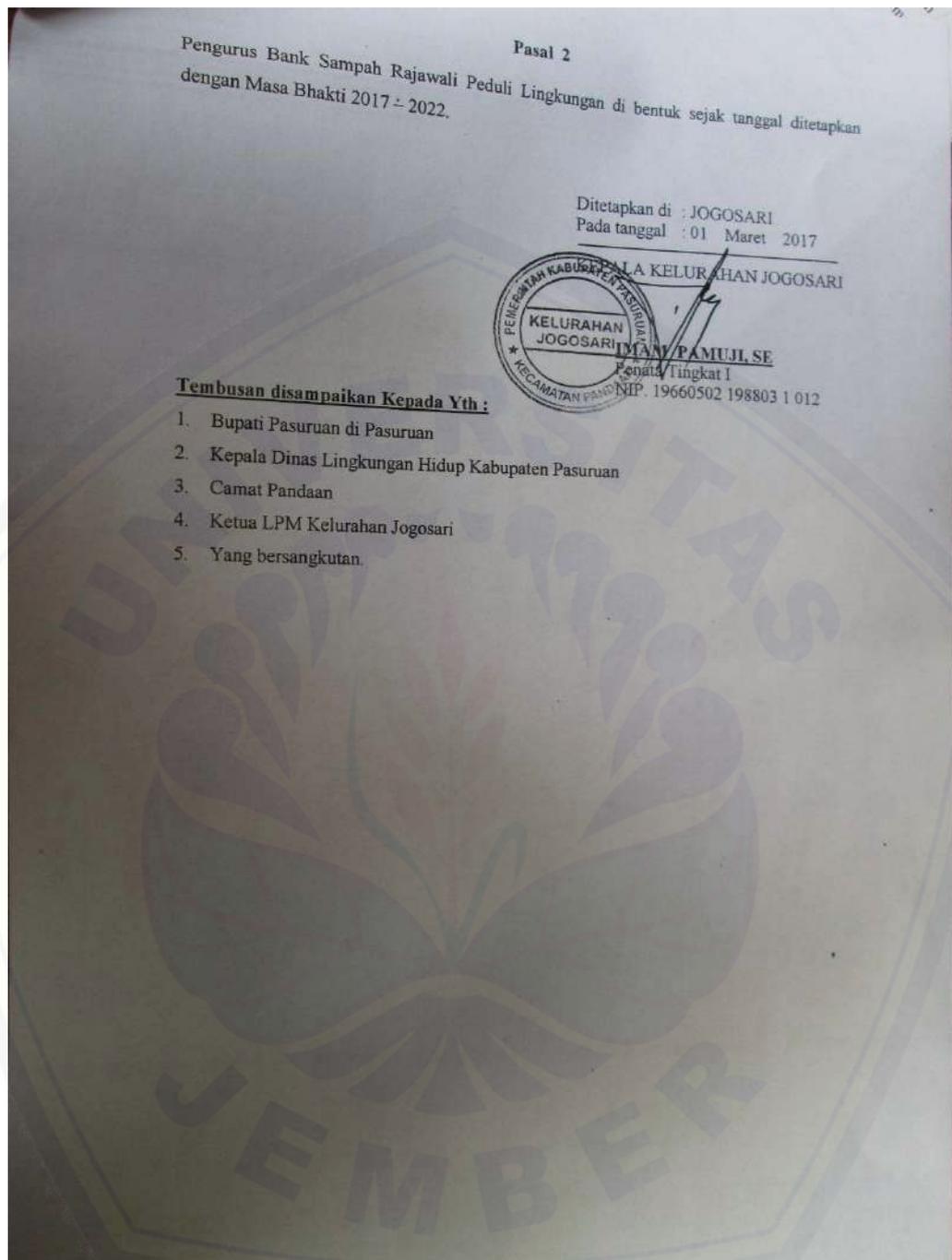
Pasal 1

Pembentukan Pengurus Bank Sampah Rajawali Peduli Lingkungan, Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :

Pelindung	: Kepala Kelurahan Jogosari
Pembina	: 1. Haji Matali 2. Agus Wijaya
Pendamping	: Forum Kelompok Peduli Lingkungan (FKPL)
Ketua	: Sugeng
Wakil Ketua	: Haji Sholeh
Sekretaris	: Mas'ud Samsudin
Bendahara	: Haji Winarno

Operasional Lapangan/Koordinator Lapangan :

Pengambilan Sampah	: Arip
Pemilahan Sampah	: Suwarno
Packing	: Suliono
Pemasaran	: Larto



Daftar Hadir Rapat

MATHIAK HAVIK

PERTEMUAN WARGA Gg. RAJAWALI RT. 03. RW. 06.

No	NAMA.	STP.	NAMA.	TTD.
1	P. SARHAM		25 IKul.	
2	IRFAN.		26 SAN	
3	JOKO		27 MIDI	
4	BEJO		28 S. S. S.	
5	SOLEH		29 Youngky	
6	SUWARNO		30 S. S. S.	
7	ARIF		31 Prad	
8	CAK MAT.		32 K.H. Sairin	✓
9	HAUMIK		33 Bakri	✓
10	Sugeng		34 P. Ji	Ag. I
11	WIN		35 H. Rosi	✓ Ag. I
12	P. BAMBANG		36 Damar	Ag. I
13	P. SENTAN		37 Yudi	✓
14	Agus W		38 C.P. Permadi	Ag. I
15	LANTO		39 H. Dur	Ag. I
16	SILHONO		40 Joni	✓
17	P. RINLO		41 Sugito	✓
18	ANWAR		42 P. Tik	✓
19	DEDI		43 P. Jined	Ag. I
20	Agus JATU		44 I. S.	✓
21	RIDWAN		45 Lilam	✓
22	LISIPAN		46 P. M. M.	✓
23	SURAB		47 Wt. Agus	✓
24	MATRIHAM		48 Abd. Fatah	✓ Ag. I

You'll never know till you have tried

SINAR QUNDA

MATHIAK HAWIK

PERTEMUAN WARGA Gg. RAJAWALI RT. 03.
RW 06.

NO	NAMA.	TTD.	NAMA.	TTD.
1	P. SARHAM	[Signature]	25 IRUL.	[Signature]
2	IRFANI.	[Signature]	26 SAN	[Signature]
3	JOKO	[Signature]	27 MIMI	[Signature]
4	BEJU	[Signature]	28 Slamet	[Signature]
5	SOLEH	[Signature]	29 Youngky	[Signature]
6	SUWARNO	[Signature]	30 Slamet	[Signature]
7	ARIF	[Signature]	31 Prad	[Signature]
8	CAK MAT.	[Signature]	32 K.H. Saifin	✓
9	HAUMIK	[Signature]	33 Bafri	✓
10	Sugeng	[Signature]	34 P. Ji	Gg. I
11	WIN -	[Signature]	35 H. Rosi	✓ Gg. I
12	P. BAMBANG	[Signature]	36 Daman	Gg. I
13	P. SENGUN	[Signature]	37 Yudi	✓
14	Agus w	[Signature]	38 C.P. Permadi	Gg. I
15	Lanto	[Signature]	39 H. Dur	Gg. I
16	SUHONO	[Signature]	40 joni	✓
17	P. RINO	[Signature]	41 Sugito	✓
18	HOWARI	[Signature]	42 P. Tik	✓
19	DEDI	[Signature]	43 P. jined	Gg. I
20	Agus JATU	[Signature]	44 Iko	✓
21	RIDWAN	[Signature]	45 Solom	✓
22	LISIPAN	[Signature]	46 Agus Imam	✓
23	SURAB	[Signature]	47 Ist. Agus	Gg. I
24	MATRHAM	[Signature]	48 Abd. Fatah	✓

You'll never know till you have tried


PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PANDAAN
KELURAHAN JOGOSARI
 JL. RAMBUTAN No.25 TELP. (0343) 631455
JOGOSARI Kode Pos. 67156.

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan :

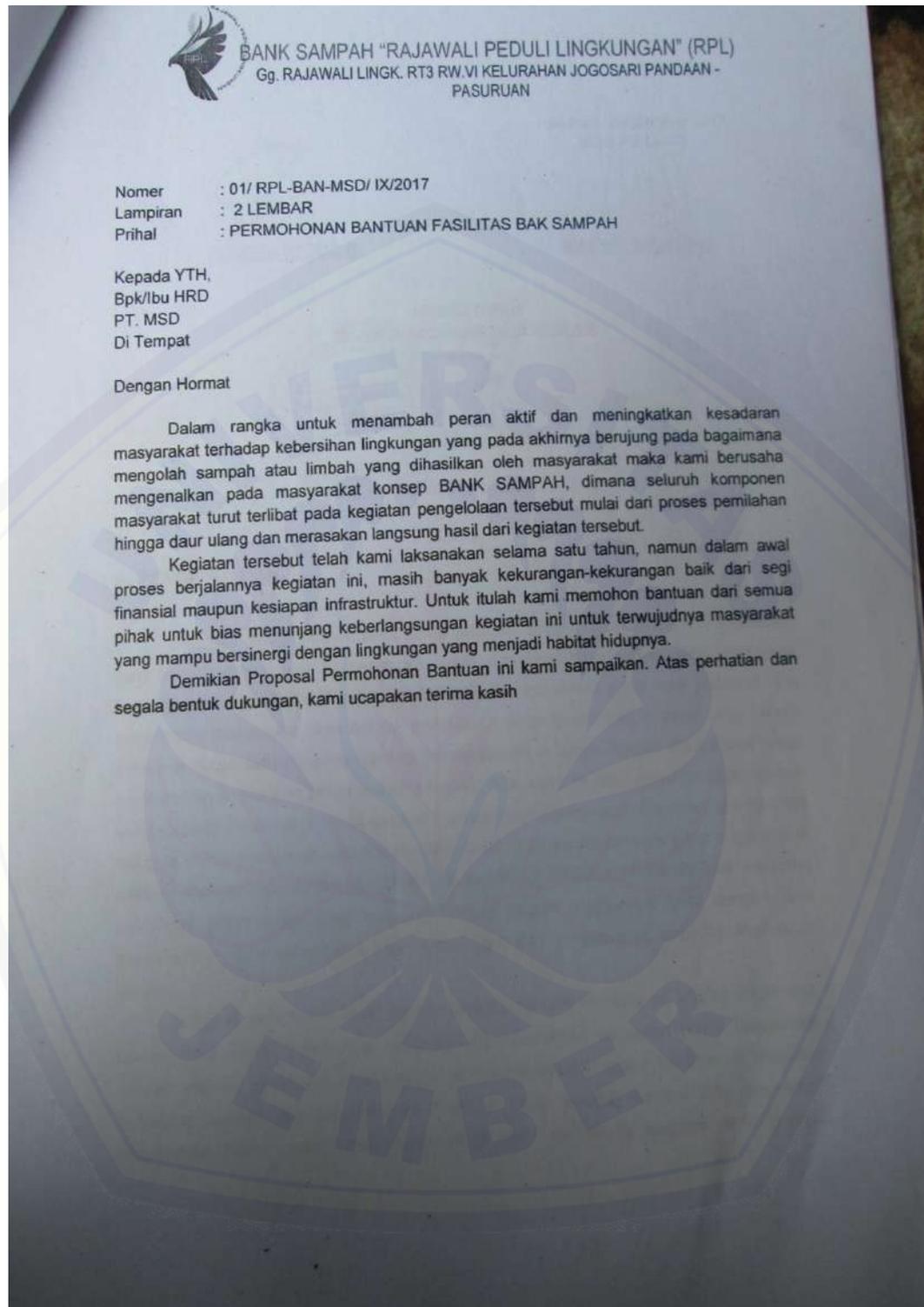
Tanggal Kegiatan :

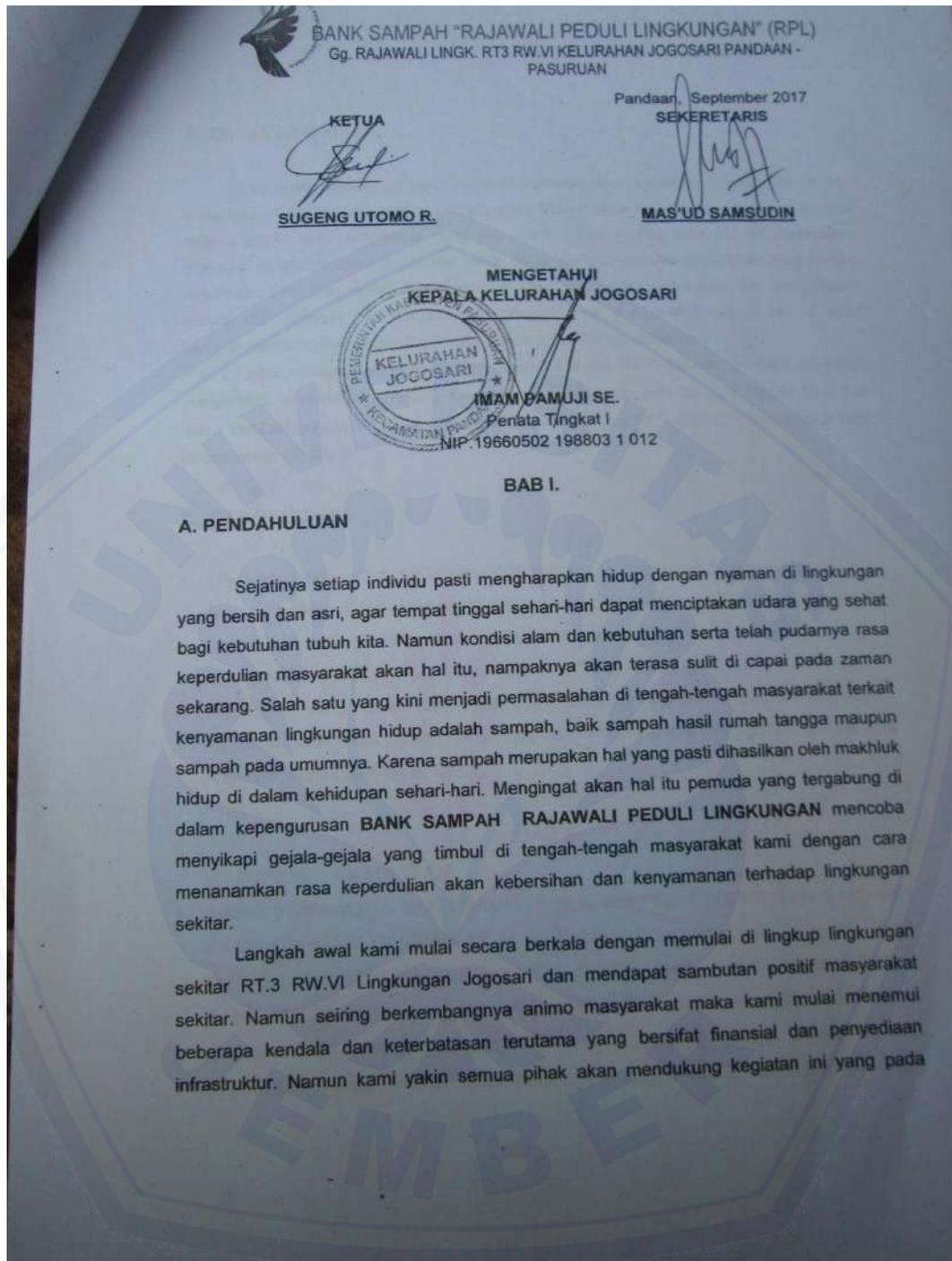
Tempat Kegiatan :

No	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA	TANGAN
1.	Iuon Rmaji	KAKEL	Jogosari	1. /	2.
				3.	4.
				5.	6.
				7.	8.
				9.	10.
				11.	12.
				13.	14.
				15.	16.
				17.	18.
				19.	20.

Proposal Pegajuan Bank Sampah oleh Bank sampah RPL









BANK SAMPAH "RAJAWALI PEDULI LINGKUNGAN" (RPL)
Gg. RAJAWALI LINGK. RT3 RW.VI KELURAHAN JOGOSARI PANDAAN -
PASURUAN

B. DASAR PEMIKIRAN

Terobosan terobosan yang telah di temukan oleh pemerintah setempat melalui kebijakannya terkait kenyamanan lingkungan hidup, akan terasa sia-sia tanpa adanya respon positif dari masyarakat yang ikut andil dalam penanganan hal ini ,Kesadaran masyarakat adalah unsur terpenting untuk dapat terciptanyasuatu lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Masyarakat harus proaktif termasuk dalam pemilahan dan pengelolaan limbah dan sampah. Namun semakin pragmatisnya masyarakat, maka hal-hal yang kerugian/keuntungannya bersifat jangka panjang cenderung diabaikan.

Untuk menumbuhkan kesadaran tersebut maka kami berinisiatif untuk membuat masyarakat merasakan langsung keuntungan apabila sampah dikelola secara baik dan benar sembari perlahan memupuk kesadaran akan pentingnya lingkungan bersih untuk saat ini dan masa depan.

C. DASAR HUKUM

- Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan tentang prinsip dalam mengelola sampah adalah reduce, reuse dan recycle yang berarti mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang lingkungan hidup
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),

BAB II

1. DESKRIPSI KEGIATAN

- Adalah pembentukan BANK SAMPAH yang akan kami jalankan dalam kegiatan ini karena BANK SAMPAH ini sebagai salah satu yang kami anggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kami diantaranya adalah BANK SAMPAH tersebut, guna untuk mewujudkan rasa kepedulian masyarakat dan mendidik pola pikir masyarakat yang mandiri dalam memanfaatkan lingkungan sekitar, serta menciptakn lingkungan yang sehat,bersih, serta



BANK SAMPAH "RAJAWALI PEDULI LINGKUNGAN" (RPL)
Gg. RAJAWALI LINGK. RT3 RW.VI KELURAHAN JOGOSARI PANDAAN - PASURUAN

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan potensi bakat dan kreatifitas masyarakat dalam menyikapi permasalahan serta memanfaatkan peluang yang ada.

- BANK SAMPAH adalah, suatu tempat yang berada di tengah-tengah masyarakat dimana tempat tersebut menjadi tujuan masyarakat untuk mendonasikan sampah yang dihasilkan baik dari sampah rumah tangga maupun sampah lainnya. Yang nantinya sampah yang di donasikan oleh masyarakat akan di kelola oleh BANK SAMPAH menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya baik dengan cara di daur ulang maupun dengan cara pengomposan.
- Setiap warga Kelurahan Jogosari nantinya wajib berpartisipasi dalam program BANK SAMPAH ini.
- Seluruh Nasabah BANK SAMPAH dapat mengantarkan sendiri sampahnya atau konfirmasi kepada pengurus BANK sampah
- Nasabah yang menabungkan sampahnya kepada BANK SAMPAH wajib di hitung berat tabungannya di dalam buku milik nasabah
- Tabungan yang di catat di buku milik nasabah di catat kedalam buku data milik BANK.po
- Setiap nasabah berhak mengambil tabungannya berupa uang/barang yang telah di tentukan
- Nasabah hanya dapat mengambil tabungan setelah hasil yang di perolehnya telah mencapai waktu satu bulan dengan pendonasian minimal empat kali dalam sebulan dan/ atau satu minggu satu kali
- Setiap nasabah wajib mendapatkan pembinaan dan penyuluhan oleh pengurus BANK
- Setiap nasabah harus memisahkan jenis-jenis sampah yang telah di klasifikasikan
- Sampah yang di setorkan kepada BANK telah di pisahkan sesuai dengan jenis-jenisnya
- Sampah yang terkumpul di BANK akan di olah kembali oleh pihak BANK atau di alihkan serta di jual kembali oleh pihak lain yang telah bekerjasama dengan pihak BANK

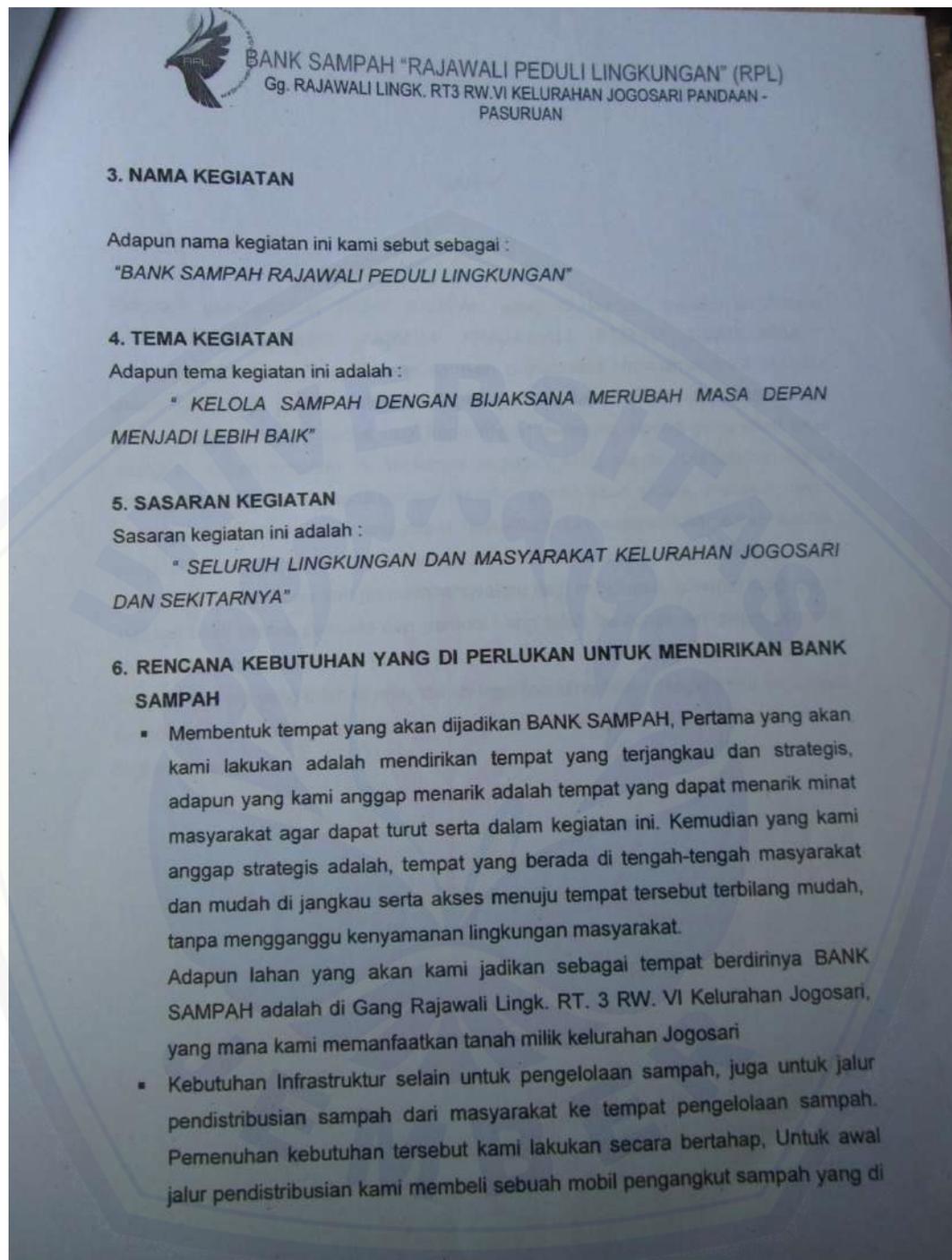


BANK SAMPAH "RAJAWALI PEDULI LINGKUNGAN" (RPL)
Gg. RAJAWALI LINGK. RT3 RW.VI KELURAHAN JOGOSARI PANDAAN -
PASURUAN

- Setiap industri Yang berdomisili di kewilayahan Batusari wajib mendistribusikan sampah/limbah yang dapat di manfaatkan kepada BANK
- Setiap sampah yang di hasilkan di wilayah kelurahan Batusari adalah tanggung jawab BANK.
- Pihak BANK berhak menegur, serta memberikan sanksi kepada masyarakat/daerah yang masih membuang sampah sembarangan
- Setiap sampah yang tidak bisa di olah atau sampah yang pantas untuk di buang maka sampah akan di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA)
- Setiap sampah yang akan di buang ke TPA akan di angkut oleh mobil dinas kebersihan dan pertamanan

2. TUJUAN KEGIATAN

- Meningkatkan kesadaran warga khususnya dilingkungan kelurahan Batusari akan pentingnya kebersihan lingkungan Dan pemanfaatan peluang.
- Mengikutsertakan warga dalam usaha mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
- Mempererat kerjasama dan interaksi antar warga masyarakat khususnya dilingkungan kelurahan Batusari.
- Agar menjadi komunitas pemuda yang kreatif, inofatif, produktif serta peduli terhadap lingkungan sekitar, serta dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negative.
- Agar dapat terciptanya lapangan pekerjaan dalam konteks mengurangi angka pengangguran di wilayah Kelurahan Jogosari – Pandaan
- Tertanggulangnya masalah limbah lokal dan dapat Mengurangi jumlah sampah yang di angkut ke tempat pambuangan akhir (TPA)
- Terciptanya produk daur ulang dengan aneka desain yang memiliki nilai jual lebih di masyarakat. Sehingga Sampah yang ada dapat menjadi kerajinan yang bernilai tinggi





BANK SAMPAH "RAJAWALI PEDULI LINGKUNGAN" (RPL)
Gg. RAJAWALI LINGK. RT3 RW.VI KELURAHAN JOGOSARI PANDAAN -
PASURUAN

BAB III

PENUTUP

Program pembentukan BANK SAMPAH yang di konsep melalui organisasi kepemudaan **KARANG TARUNA "RAJAWALI PEDULI LINGKUNGAN"** merupakan harapan yang di idam-idamkan masyarakat khususnya para pemuda dalam menyikapi permasalahan di lingkungan sekitar, mengingat permasalahan yang di anggap cukup serius bagi kepentingan bersama, semua yang akan kami tuangkan dalam program ini sekiranya kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan. Baik dalam penanganan masalah pemanasan global, maupun dalam penanganan resiko-resiko yang dapat dihasilkan dari sampah-sampah di sekitar, yang belakangan ini sering diremehkan keberadaannya padahal resiko yang terkandung didalamnya sangat membahayakan bagi kehidupan. Minimal program ini menjadi bukti bahwa pemuda dan pemudi yang telah berkomitmen dalam program ini mencoba melakukan hal positif yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Seperti yang telah di amanatkan oleh founding father Negara kita ini, bahwa setiap pemuda wajib memberikan sumbangsih tenaga, pemikiran, yang berguna bagi bangsanya.

Hasil foto dokumentasi penelitian



Penelitian di Bank Sampah Kampung Limo, Desa Pleret,
Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan



Wawancara bapak Agus Supriyono Kepala Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek



Wawancara bapak Rijono sekretaris desa Pleret



Wawancara bapak M.Soleh ketua LPM Desa Pleret



Wawancara ibu Peny Direktur Bank Sampah Kampung Limo



Wawancara bapak Soleh selaku Pengepul
(Pemilik UD.Ridho Rizki)



Wawancara pengurus bank sampah Kampung
Limo



Wawancara masyarakat sekaligus nasabah bank sampah kampung limo



Pengambilan sampah oleh pengepul UD.Ridho Rizki



Etalase hasil keterampilan daur ulang



Papan informasi



Pembukuan Bank Sampah Kampung Limo



BANK SAMPAH "KAMPOENG LIMO"				
Kartu Penerimaan Tabungan Sampah RW. 08 Piyat				
No. Rekening: []				
Nama Pemilik: []				
No	Tanggal	Jenis Simpanan	Modal Simpanan	Piutang
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Kertu Anggota dan Kartu Tabungan Bank Sampah Kampung Limo

Tanggal	Jumlah	Uraian	Ditambah	Total	Harga	Saldo
10 Desember 2014	100	Kardus	100	100	1000	1000
15 Desember 2014	50	Kardus	150	150	1500	1500
20 Desember 2014	20	Kardus	170	170	1700	1700
25 Desember 2014	10	Kardus	180	180	1800	1800
30 Desember 2014	5	Kardus	185	185	1850	1850
31 Desember 2014	0	Kardus	185	185	1850	1850

Data Inventaris Bank Sampah Kampung Limo

Tanggal	Jumlah	Harga	Saldo
10 Desember 2014	100	1000	1000
15 Desember 2014	50	500	1500
20 Desember 2014	20	200	1700
25 Desember 2014	10	100	1800
30 Desember 2014	5	50	1850
31 Desember 2014	0	0	1850

Rekapan hasil timbangan sampah nasabah



Gedung Bank Sampah Kampung Limo

No	Jumlah	Harga	Saldo
1	100	1000	1000
2	50	500	1500
3	20	200	1700
4	10	100	1800
5	5	50	1850
6	0	0	1850
7	0	0	1850
8	0	0	1850
9	0	0	1850
10	0	0	1850
11	0	0	1850
12	0	0	1850
13	0	0	1850
14	0	0	1850
15	0	0	1850
16	0	0	1850
17	0	0	1850
18	0	0	1850
19	0	0	1850
20	0	0	1850
21	0	0	1850
22	0	0	1850
23	0	0	1850
24	0	0	1850
25	0	0	1850
26	0	0	1850
27	0	0	1850
28	0	0	1850
29	0	0	1850
30	0	0	1850

Daftar Harga sampah

DAFTAR HADIR
RAPAT KORDINASI PERSIAPAN KUNJUNGAN
"BUPATI PASURUAN"

NO.	NAMA	RT/RW	TANDA TANGAN
1.	Bpk. AGUS S		1. <i>[Signature]</i>
2.	Elvina M F SUDIRO	01/01	2. <i>[Signature]</i>
3.	A. B. Sidiq	02/06	3. <i>[Signature]</i>
4.	Khoton Hoss	02/05	4. <i>[Signature]</i>
5.	Aleddy H	05/05	5. <i>[Signature]</i>
6.	Rizki F	08/03	6. <i>[Signature]</i>
7.	Sri Sundari	RW	7. <i>[Signature]</i>
8.	Diana	RW 5	8. <i>[Signature]</i>
9.	Khatibah	RW 5	9. <i>[Signature]</i>
10.	Samsiah	--	10. <i>[Signature]</i>
11.	Sri Centari	--	11. <i>[Signature]</i>
12.	Ulfaiah	--	12. <i>[Signature]</i>
13.	ALFIA H	--	13. <i>[Signature]</i>
14.	NARMI	--	14. <i>[Signature]</i>
15.	Sri Wahyuni	--	15. <i>[Signature]</i>
16.	M. IMRON	--	16. <i>[Signature]</i>
17.	Evy Ruspanti	01/02	17. <i>[Signature]</i>
18.	Pranaw W	01/05	18. <i>[Signature]</i>

NO.	NAMA	RT/RW	TANDA TANGAN
20	Juglarijg	01/05	20. <i>[Signature]</i>

TANGGAL: 26 Mei '16

NO.	NAMA	RT/RW	TANDA TANGAN
1.	B. Poni	02/05	1. <i>[Signature]</i>
2.	B. Khatibah	02/05	2. <i>[Signature]</i>
3.	B. Ingi	01/05	3. <i>[Signature]</i>
4.	B. Sri Centari	01/05	4. <i>[Signature]</i>
5.	B. Diana	05/05	5. <i>[Signature]</i>
6.	B. Turmudzi	02/05	6. <i>[Signature]</i>
7.	B. Nawar	01/05	7. <i>[Signature]</i>
8.	B. Bambang	02/05	8. <i>[Signature]</i>
9.	B. Narmi	05/05	9. <i>[Signature]</i>
10.	B. Alfiah	03/05	10. <i>[Signature]</i>
11.	B. Sigit	03/05	11. <i>[Signature]</i>

TANGGAL: 9 Juni '16

NO.	NAMA	RT/RW	TANDA TANGAN
1.	B. Poni	2/5	1. <i>[Signature]</i>
2.	B. Khatibah	3/5	2. <i>[Signature]</i>
3.	B. Diana	5/5	3. <i>[Signature]</i>
4.	B. Sahri (Bani)	3/5	4. <i>[Signature]</i>
5.	B. Ingi	1/5	5. <i>[Signature]</i>
6.	B. Sri Bambang	4/5	6. <i>[Signature]</i>
7.	B. Sri Prasman	4/5	7. <i>[Signature]</i>
8.	B. Samsiah	1/5	8. <i>[Signature]</i>
9.	B. Alfiah	3/5	9. <i>[Signature]</i>
10.	B. Narmi	2/5	10. <i>[Signature]</i>
11.	B. Evi	2/5	11. <i>[Signature]</i>
12.	B. Djumalifah	4/5	12. <i>[Signature]</i>

Absensi Rapat Koordinasi Kegiatan Bank Sampah Kampung Limo

diigant

1. Kardor = 12 + 18 + 17 + 25 + 27 + 18,5 + 14 + 190,5 kg x 1.600 = 408.800

2. Duplek = 25 + 18,5 + 42,5 + 18 = 104 kg x 600 = 62.400

3. Hvs = 38 + 14 = 52 kg x 200 x 2 = 108.200

4. Bagan = 33 = 33 kg x 1500 = 49.500

5. Botol kecap = 26 kg x 200 = 5.200

6. Botol Kop B = 19 x 200 = 3.800

7. Botol Gup = 82 x 200 = 16.400

8. Botol Spat/Banta = 10 x 200 = 2.000

9. Botol air = 3,5 + 4 + 2,5 + 5 + 5,5 + 2,5 + 3,2 + 3 = 31,2 kg x 2.400 = 74.880

10. Kaleng = 4 + 6,5 + 10,5 = 21 kg x 1.800 = 37.800

11. Bot plastik warna = 4 + 8 + 13 = 25 kg x 4.200 = 105.000

12. Plastik kecap UCD = 3,5 kg x 5.000 = 17.500

13. Kerakan = 8 + 2,5 + 3 = 13,5 kg x 400 = 5.400

diigant

15. Komper = 10,5 kg x 2.000 = 21.000

16. PS Kaca (toples kue) = 3 kg x 5.000 = 15.000

17. Plastik gula/putih = 1,5 kg x 1.000 = 1.500

18. Bui = 1,5 kg x 3.000 = 4.500

19. Bak putih = 13 kg x 4.000 = 52.000

20. Aluminium = 2 kg x 12.000 = 24.000

Σ = 840.180,-

diigant

Kanis (7-12-2017)

jumlah s 661.000

jumlah p 426.290

234.710

661.000

10.000 Beli kue + minyak 1/4 pengapal

651.000

Tgl. 7-8-2017

900.000

bayar 750.000

150.000 +

100.000

50.000 blm dibayar

Nota penjualan sampah tahun 2017 dan 2018

NAMA - NAMA ANGGOTA BANK SAMPAH KAMPUNG LIMO

No. Urut	No. Rekening	NAMA	RT
1	01-03-5-2013	Bu. Sugandi	01
2	02-03-5-2013	Bu. Suryadi	01
3	03-03-5-2013	Bu. Fandi	01
4	04-03-5-2013	Bu. Sukri	02
5	05-03-5-2013	Bu. Totom /Audi	01
6	06-03-5-2013	Bu. Terband	04
7	07-03-5-2013	Bu. Widay	01
8	08-03-5-2013	Bu. Widay	01
9	09-03-5-2013	Bu. Yuliana	01
10	10-03-5-2013	Bu. Njumb	01
11	11-03-5-2013	Bu. Padi	02
12	12-03-5-2013	Bu. Anu	01
13	13-03-5-2013	Bu. Yudi	01
14	14-03-5-2013	Bu. Alex	01
15	15-03-5-2013	Bu. Satrio	01
16	16-03-5-2013	Bu. Ding	01
17	17-03-5-2013	Bu. Yucun Cip	01
18	18-03-5-2013	Bu. ATN John	01
19	19-03-5-2013	Bu. Tedy	01
20	20-03-5-2013	Bu. Ramdan	01

NAMA - NAMA ANGGOTA BANK SAMPAH KAMPUNG LIMO

No. Urut	No. Rekening	NAMA	RT
21	01-04-5-2013	Bu. Fik Dardo	01
22	02-04-5-2013	Bu. Umar	04
23	03-04-5-2013	Bu. Gede	01
24	04-04-5-2013	Bu. Sri Bandi	01
25	05-04-5-2013	Bu. Hadi	01
26	06-04-5-2013	Bu. Huda	01
27	07-04-5-2013	Bu. Supiah	01
28	08-04-5-2013	Bu. Supiah	01
29	09-04-5-2013	Bu. Supiah	01
30	10-04-5-2013	Bu. Ycha	01
31	11-04-5-2013	Bu. Lili-ban	01
32	12-04-5-2013	Bu. Lic Salim	01
33	13-04-5-2013	Bu. Paru	01
34	14-04-5-2013	Bu. Suno	01
35	15-04-5-2013	Bu. Sudarwati	01
36	16-04-5-2013	Bu. Santi	01
37	17-04-5-2013	Bu. Yudi	01
38	18-04-5-2013	Bu. Anant	01
39	19-04-5-2013	Bu. Tia gandi	01
40	20-04-5-2013	Bu. Yuni Andre	01

NAMA - NAMA ANGGOTA BANK SAMPAH KAMPUNG LIMO

No. Urut	No. Rekening	NAMA	RT
41	01-07-7-2013	Bu. Tholis	01
42	02-07-7-2013	Bu. Setyan	01
43	03-07-7-2013	Bu. Siska	01
44	04-07-7-2013	Bu. Yudi	01
45	05-07-7-2013	Bu. Liliwati	01
46	06-07-7-2013	Bu. Yoni (pa yan)	01
47	07-07-7-2013	Bu. Sri Bambang	01
48	08-07-7-2013	Bu. Fandi	01
49	09-07-7-2013	Bu. Rizalman	01
50	10-07-7-2013	Bu. Yudi	01
51	11-07-7-2013	Bu. Arman	01
52	12-07-7-2013	Bu. Andri	01
53	13-07-7-2013	Bu. Helenzel	01
54	14-07-7-2013	Bu. Toni	01
55	15-07-7-2013	Bu. Suciati	01
56	16-07-7-2013	Bu. Eri	01
57	17-07-7-2013	Bu. Tina	01
58	18-07-7-2013	Bu. Hana	01
59	19-07-7-2013	Bu. Alza	01
60	20-07-7-2013	Bu. Sulfano	01

NAMA - NAMA ANGGOTA BANK SAMPAH KAMPUNG LIMO

No. Urut	No. Rekening	NAMA	RT
61	01-09-9-2013	Bu. Mira	01
62	02-09-9-2013	Bu. Hji Susanto	01
63	03-09-9-2013	Bu. Leni	01
64	04-09-9-2013	Bu. Zuhri	01
65	05-09-9-2013	Bu. Harlan	01
66	06-09-9-2013	Bu. Sani	01
67	07-09-9-2013	B. Khotudin	01
68	08-09-9-2013	B. Ton Cuo	01
69	09-09-9-2013	B. Yudi -	01
70	10-09-9-2013	B. Fandi	01
71	11-09-9-2013	B. Widi	01
72	12-09-9-2013	B. Bahaudah	01
73	13-09-9-2013	B. Muliati	01
74	14-09-9-2013	B. Yudi	01
75	15-09-9-2013	B. Yudi	01
76	16-09-9-2013	B. Yudi	01
77	17-09-9-2013	B. Yudi	01
78	18-09-9-2013	B. Yudi	01
79	19-09-9-2013	B. Yudi	01
80	20-09-9-2013	B. Yudi	01

NAMA - NAMA ANGGOTA BANK SAMPAH KAMPUNG LIMO

No. Urut	No. Rekening	NAMA	RT
81	081-03-12-201	B. HUDA	01
82	082-03-12-201	B. ROZAK	01
83	083-03-12-201	B. ANDAR -	01
84	084-03-12-201	B. ADI	01

Data Anggota Bank Sampah Kampung Limo

Surat Keputusan Kepala Desa Pleret tentang Pengelolaan Sampah/Bank Sampah



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KANTOR DESA PLERET
KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN
 Jln Raya Pleret No 01 Tlp : (4303) 411901 HP.0812354610170

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLERET
 KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN
 NO : 141 / 15 / 424.217.03 / 2014

TENTANG
 PENGELOLAAN SAMPAH/BANK SAMPAH
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 KEPALA DESA PLERET

Menimbang :

- a. Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola aktifitas kehidupan masyarakat menimbulkan bertambahnya volume sampah yang semakin beragam;
- b. Bahwa sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pemerintah perlu peran serta masyarakat dalam pengelolannya, hingga memberikan manfaat, ekonomi, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 ayat (1);
2. Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (3) dan (4).

Memperhatikan :

Hasil Musyawarah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Wanita RW 05 Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek pada tanggal : 3 April 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah "KAMPUNG LIMO" RW 05 Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan

KEDUA :

Susunan Kepengurusan Bank Sampah "KAMPUNG LIMO" RW.05 Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek kabupaten Pasuruan terdiri dari

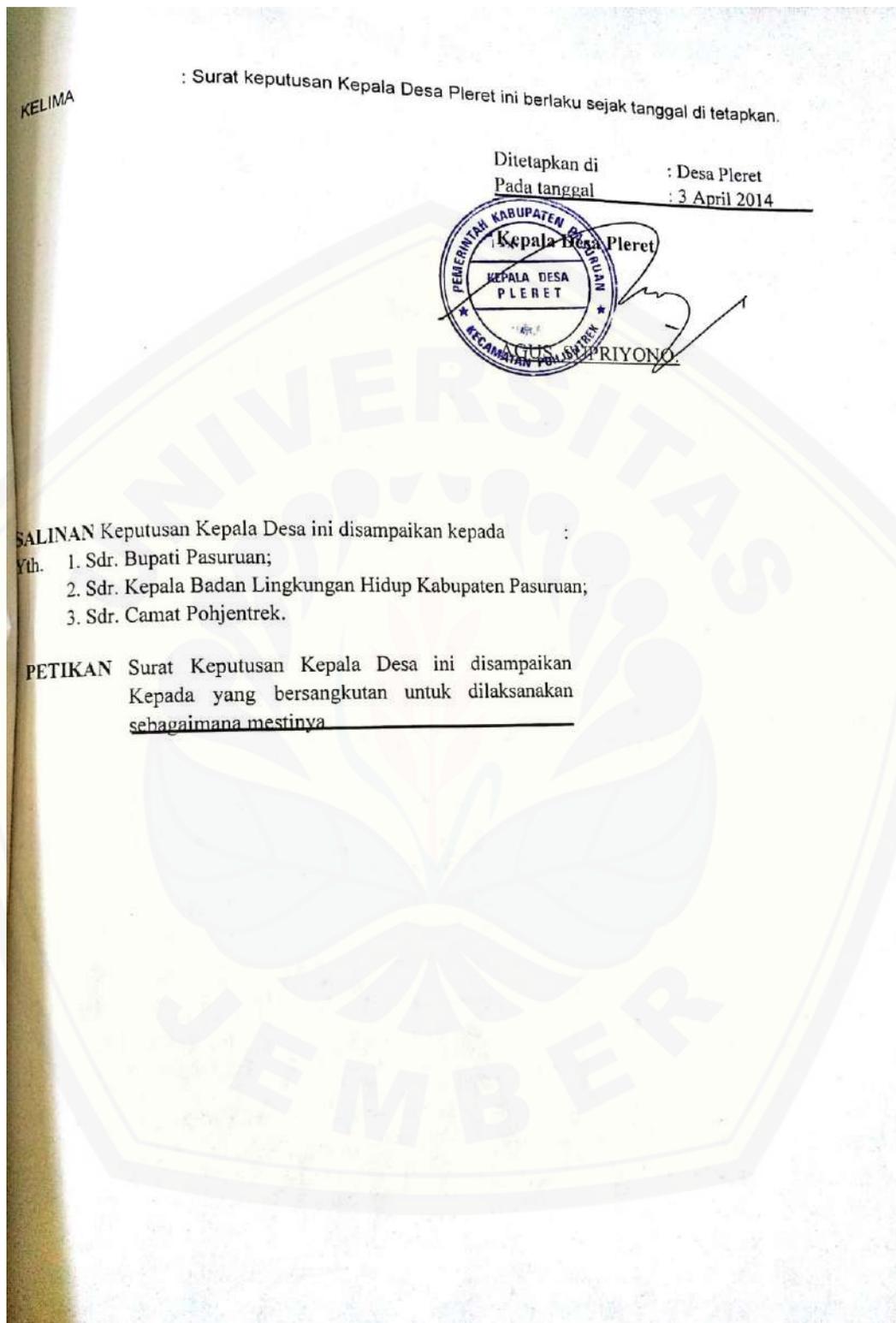
- | | |
|----------------|----------------------------|
| a. Ketua | : SRI LESTARI |
| b. Wakil Ketua | : YUGIAPRILLY KARTININGRUM |
| c. Sekretaris | : DIANA ICHWATU |
| d. Bendahara | : URIFAH |

KETIGA :

Mengingat Kepengurusan Sebagai Pimpinan Bank Sampah "KAMPUNG LIMO" RW.05 Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.



Lampiran : SK Pengelolaan Sampah/Bank Sampah
 Nomor : 141./ 15 /424.217.03./ 2014
 Tanggal : 3 April 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGELOLAAN SAMAPAH/BANK SAMPAH
 TINGKAT DESA PLERET TAHUN 2014

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1.	AGUS SUPRIYONO	Pelindung/Penasehat	Kepala Desa Pleret
2.	M.SOLEH	Pelindung/Penasehat	Ketua LPM
3.	MOKHAMAD SOLEH,SE	Pelindung/Penasehat	Ketua RW. 05
4.	ZAINAL ARIFIN	Pelindung/Penasehat	Ketua RT. 04
5.	SRI LESTARI	Ketua	
6.	YUGIAPRILLY .K	Wakil Ketua	
7.	DIANA ICHWATUL.I	Sekretaris	
8.	URIFAH	Bendahara	
9.	SUDARWATI	Sie Penerima	
10.	SRI WAHYUNI	Sie Pemilahan	
11.	SAMIASIH	Sie Penimbangan	
12.	SOIMAH	Sie Penimbangan	
13.	SITI JUMAIYAH	Sie Pengemasan	
14.	SUDIATININGSIH	Sie Pengemasan	
15.	NARMI	Sie Ketrampilan	
16.	HANI SARASWATI	Sie Ketrampilan	



Laporan Keuangan Pembangunan Gedung Bank Sampah Kampung Limo

Data Keuangan Pembangunan Gedung bank sampah " KAMPOENG LIMO "
Pembuatan Gedung serba guna RW 5
TAHAP II

No	Keterangan	Pemasukan	Pengeluaran	
1	Terima dana dari desa	Rp 55.100.000		
2	Sumbangan			
	1. P Soleh (RW)	Rp 3.000.000		
	2. P Agus (Lurah)	Rp 2.000.000		
	3. Mitra Akses Suropati	Rp 5.000.000		
	4. P Achiyar	Rp 1.000.000		
	5. P Irawan	Rp 1.000.000		
3	Pembelian Material (atap,bangunan,pintu dan Listrik)		Rp 44.909.500	
4	Konsumsi		Rp 2.476.500	
5	Ongkos Tukang		Rp 15.730.000	
6	Pulsa Listrik		Rp 179.000	
7	Pelunasan hutang pondasi		Rp 2.580.000	
8	Pasang Listrik		Rp 1.000.000	
9	Beli alat kebersihan bank sampah		Rp 315.000	
10	Pembelian Batu Prasasti		Rp 1.150.000	
11	Sewa Gerobak		Rp 140.000	
	Total Pengeluaran		Rp 68.480.000	
	Saldo per 6 Juni 2016		Rp (1.380.000)	Minus
		Rp 67.100.000	Rp 67.100.000	

NB : Sumbangan dari P.Sumarto (500 rb) dan P Bagiono (150 rb) dibelikan 3 buah Kipas Angin
 Sedangkan sound sistem dari NN

Pleret, 6 Juni 2016

Ketua Panitia

Bendahara

(Khoiron H)

(Irawan W)

Ketua RW 05

(Bp. M.Soleh)

Laporan data keuangan acara peresmian bank sampah Kampung Limo

Data Keuangan Acara Peresmian Bank sampah " KAMPOENG LIMO "
Tanggal 3 Juni 2016

No	Keterangan	Pemasukan	Pengeluaran
1	Dana dari desa	Rp 10.000.000	
2	Konsumsi		Rp 4.150.000
3	Sewa tenda / terop		Rp 3.940.000
4	Cetak undangan		Rp 100.000
5	Cetak baner dan stiker		Rp 572.000
6	Pembelian sterofom		Rp 200.000
7	Los Listrik		Rp 200.000
8	Pembelian Aqua Botol		Rp 438.000
	Total pengeluaran		Rp 9.600.000
	Saldo		Rp 400.000
	TOTAL	Rp 10.000.000	Rp 1.000.000

Pleret, 12 Juni 2016

Ketua Panitia

Bendahara

(Khoiron H)

(Irawan W)

Ketua RW 05

(Bp. M.Soleh)

Lampiran 6.11 Perbup Pasuruan No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbup Pasuruan No. 24 Tahun 2015



BUPATI PASURUAN
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur kewajiban pemilahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse* dan *recycle* di Kabupaten Pasuruan sebagai upaya pengurangan dan penanganan sampah, salah satunya yang harus dilengkapi adalah kewajiban setiap orang, kewajiban Pemerintah Desa/Kelurahan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan nomor 24 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,

- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Manetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban**

2. Setelah Pasal 3 ditambahkan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C dan pasal 3D yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Setiap orang di seluruh wilayah desa dan kota di Kabupaten Pasuruan wajib melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.
- (2) Pemilahan sampah yang dimaksud pada diktum KESATU adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga;
 - b. sampah yang mudah terurai (organik);
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang memiliki nilai ekonomis (laku dijual); dan
 - e. sampah lainnya (residu) untuk dibuang ke Tempat Pemrosesan sampah Akhir (TPA);

Pasal 3B

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib membentuk kader pemberdayaan masyarakat yang disebut Kader Lingkungan untuk membantu pelaksanaan pengelolaan lingkungan di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan atau Pengelola kawasan permukiman dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan dan mengelola sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan dan atau Pengelola kawasan permukiman dalam hal menyediakan dan mengelola sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan wajib :
 - a. Menyediakan lahan seluas sekurang-kurangnya 200 m² untuk TPS 3R.
 - b. Menganggarkan biaya untuk pengelolaan sampah.
 - c. Memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pemilahan sampah dan pengolahan sampah.
 - d. Memberikan laporan secara berkala (setiap 3 bulan sekali) kepada Bupati Pasuruan melalui SKPD terkait mengenai pengelolaan TPS 3R dan Bank Sampah di wilayah kerjanya.
 - e. Membuka dan mengkaji peluang bagi pihak ketiga untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan utamanya pengelolaan sampah skala kawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3C

- (1) Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal pemilahan sampah wajib :
 - a. Memfasilitasi sarana dan prasaranan pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
 - b. Menyediakan sarana dan prasaranan pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten.
 - c. Memberikan pembinaan berupa pendidikan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam hal pemilahan sampah dan pengolahan sampah.
 - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala permukiman dan skala perkotaan.
 - e. Membuka dan mengkaji peluang bagi pihak ketiga untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan utamanya pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3D

Pihak ketiga yang dimaksud pada Pasal 3B ayat (3) huruf e dan dan Pasal 3C ayat (1) huruf e di antaranya adalah pihak industri/perusahaan, kader masyarakat, kader lingkungan, forum komunikasi baik dari dalam maupun luar Kabupaten Pasuruan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2016



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 22